

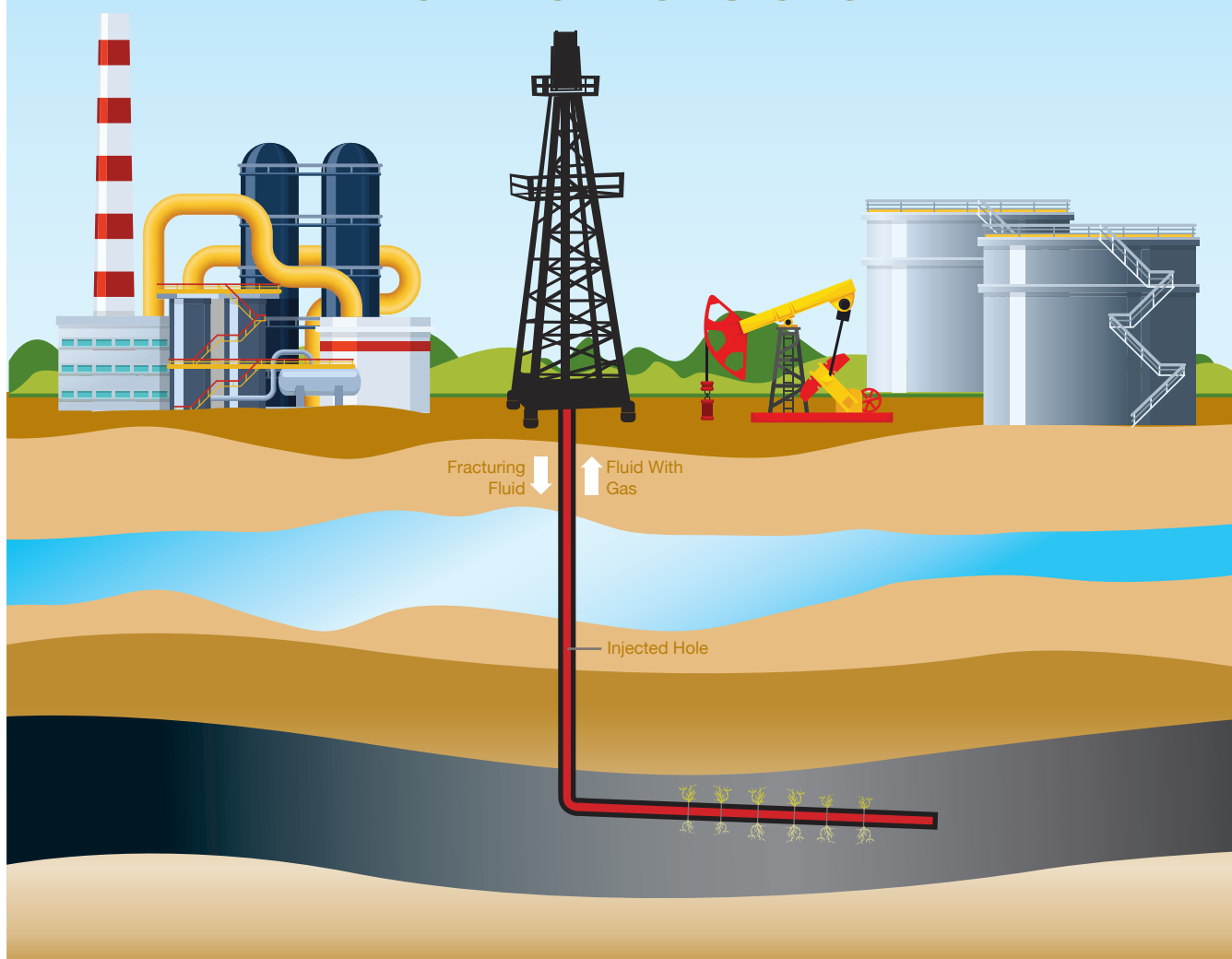


DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 07 Januari-Juni 2021

Potensi Besar, Pemerintah Kembangkan Migas Non Konvensional



SAJIAN UTAMA

Mendukung
Pengembangan CCUS
di Sektor Migas

SOROT

Database Mutakhir Dorong
Penataan Alur Pipa dan
Kabel Bawah Laut

REGULASI

Komitmen Terapkan GCG,
Menteri ESDM Teken
Aturan Pengendalian
Gratifikasi

Lawan KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Potensi Besar, Pemerintah Kembangkan Migas Non Konvensional

JURNAL MIGAS
Issue 07 Januari-Juni 2021



Memasuki tahun 2021, pandemi Covid-19 belum berakhir. Potensi dampak pandemi Covid-19 bisa bertambah dahsyat sebab ditemukannya virus varian baru yang sudah menggejala di berbagai negara sejak akhir tahun lalu. Sejumlah sektor masih akan menghadapi tantangan berat di tahun ini yang utamanya akibat pandemi Covid-19.

Tantangan berat pun menghadang laju subsektor minyak dan gas bumi (migas). Rendahnya kebutuhan migas dunia diiringi dengan pasokan berlebih menjadi satu dari sekian tantangan yang harus dihadapi di tahun 2021. Tambah pula, kapan pandemi Covid-19 berakhir sulit untuk diprediksi.

Sebenarnya, fenomena “(s)low demand and over supply” tak hanya dialami di subsektor migas. Sejumlah subsektor lainnya pun mengalaminya. Harga energi cenderung murah. Sayangnya, sedikit yang membelinya karena memang saat ini kurang dibutuhkan karena lemahnya daya beli masyarakat.

Meski menghadapi tantangan terjal, Ditjen Migas tetap berupaya optimal melaksanakan program-program strategis yang telah ditetapkan, seperti mempercepat pembangunan infrastruktur kilang dan jaringan gas bumi guna menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Impor BBM dan LPG yang makin menyusut berarti meringankan beban devisa negara.

Di tahun 2021, Ditjen Migas pun telah menetapkan delapan target besar. Penawaran 10 wilayah kerja (WK) migas; pemanfaatan gas domestik hingga 65% yang akan diserap oleh industri dan kelistrikan; pembangunan jargas sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR); *lifting* migas sebesar 705 MBOPD serta *lifting* gas bumi sebesar 1007 MBOPD adalah beberapa target yang dimaksud.

Namun, sekeras apapun usaha yang dilakukan untuk merealisasikan target-target tersebut akan percuma tanpa adanya dukungan seluruh *stakeholder* subsektor migas. Terlebih, saat ini kita menghadapi ‘musuh bersama’ yang bernama Covid-19.

Optimisme tak boleh padam. Ayo, bangkit dan bersatu untuk Indonesia lebih sehat, untuk Indonesia lebih maju!



21

>> SOROT

Database Mutakhir Dorong Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melakukan pemutakhiran database pipa penyalur kegiatan minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai wilayah Republik Indonesia. Penataan alur pipa dan kabel bawah laut di Indonesia bertujuan untuk menata ruang wilayah laut Indonesia agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

JURNAL MIGAS

Issue 07 Januari-Juni 2021

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
ISSN 2528-4169

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas
Redaktur **Mohammad Alfansyah**
Editor/ Penyunting **Akhmad Fauzi Budiman, Rizky Amalia Wismashanti**
Desain Grafis dan Fotografer
Agustiawan Mendrofa,
Krisna Dinda Bestari
Sekretariat **Sinta Raesanti,**
Kabul Priyono,
Kontributor **Tursilowulan Wahyu,**
Dian Apriani

6 SAJIAN UTAMA

Potensi Besar, Pemerintah Kembangkan Migas Non Konvensional

8 Kembangkan MNK, Pemerintah Siapkan Tiga Rencana

12 Mendukung Pengembangan CCUS di Sektor Migas

15 REGULASI

Komitmen Terapkan GCG, Menteri ESDM Teken Aturan Pengendalian Gratifikasi

18 Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Joko Widodo Teken Perubahan Atas Perpres Penetapan Harga Gas Bumi

21 SOROT

Database Mutakhir Dorong Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut

24 REFORMASI BIROKRASI

Tekad Kuat Wujudkan WBK/WBBM, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Tanda Tangan Komitmen Bersama

25 Direktorat Teknik dan Lingkung Migas Optimis Wujudkan WBBM

26 KOLOM

Pemilihan dan Desain Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas

32 NEWS

Bahas Kartu Kendali LPG 3 Kg, Dirjen Migas Terima Kunjungan Gubernur Babel

Kembali, Ditjen Migas Gelar Bincang Kesehatan

Refocusing Anggaran Rp1,1 Triliun Tak Pangkas Pembangunan Infrastruktur untuk Masyarakat

Inilah Capaian Subsektor Migas Tahun 2020 dan Target Tahun 2021

Pemerintah Tetap Kejar Target *Lifting* Minyak 1 Juta Barel

Ditjen Migas Salurkan Bantuan untuk Pegawai Korban Banjir

Menteri ESDM Lantik Empat Pejabat Eselon II Ditjen Migas

contents



8

>> SAJIAN UTAMA

Kembangkan MNK, Pemerintah Siapkan Tiga Rencana

Pemerintah terus berupaya mengembangkan migas non konvensional (MNK). Setidaknya, ada tiga rencana yang telah disiapkan untuk pengembangan MNK di tanah air.

Tingkatkan Pengawasan Peralatan dan Instalasi, Ditjen Migas Adakan Ditjen Migas *Workshop Residual Life Assessment* (RLA)

Pastikan Regulasi Diterapkan Badan Usaha, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kunjungi Jaringan Pipa PT MUI

Indonesia Tawarkan Enam WK Migas Baru

Dorong Iklim Investasi, Pemerintah Gelar *Oil and Gas Investment Day*

Miliki Kandungan Migas Potensial, Lapangan Maha-2 Ditargetkan *On Stream* Tahun 2024

Tingkatkan Keekonomian Lapangan, Menteri ESDM Resmikan Proyek Merakes

Pengapalan ke-700, Produksi Total Minyak Blok Cepu Lampau Target

Ditjen Migas Gelar Konsultasi Publik Jargas di Sejumlah Wilayah

Ini Rencana Pemerintah Salurkan LPG 3 Kg

Perluas Penerima Manfaat, Tiga Tahap Kontrak Jargas Ditandatangani

Dorong Kemudahan Berusaha, Kementerian ESDM Luncurkan Aplikasi SKUP dan APDN Migas

Pemerintah Bagikan 56.000 Paket Konkit Tahun Ini

Ditjen Migas Gelar *Workshop* Pengenalan Industri Penyimpanan BBM

Ditjen Migas Sosialisasikan Persiapan SKP Berbasis Hasil Kinerja 2021

Knowledge Sharing: Menghadapi Tantangan Pengelolaan SDM di Era Pandemi Covid-19

April 2022, Kementerian ESDM dan Stakeholder Siap Implementasikan Standar Euro 4 pada Kendaraan Diesel

Bangkitkan Industri Hulu Migas, Menteri ESDM Ajukan Insentif Fiskal

Investigasi Kebakaran, Menteri ESDM dan Dirjen Migas Kunjungi Kilang Balongan

Menteri ESDM dan DPR Sepakati Asumsi Makro Sektor ESDM dan Pagu Indikatif Tahun 2022

Tingkatkan Kompetensi Pegawai, Ditjen Migas Adakan *Workshop* Perbandingan Regulasi Pengusahaan Gas Bumi Melalui Pipa di Dunia Internasional

Pemerintah Dorong Tumbuhnya Industri Agar Bisa Serap Gas Lapangan Sinamar

Kementerian ESDM-The Methanol Institute Bersinergi Kembangkan Metanol

Kementerian ESDM Gandeng TNI AL Tingkatkan Pengawasan Migas Lepas Pantai

Hibah SPBG CNG, Ditjen Migas-NEDO Pererat Kerja Sama

Dirjen Migas Tinjau Pembangunan PLTGU Jawa Satu

Tahun 2029, Operator Tangguh LNG Mayoritas Asal Papua

Lebih dari 5 Ribu Pegawai Kementerian ESDM Berpartisipasi dalam Vaksinasi Covid-19

Alih Kelola Blok Rokan Dipastikan Berjalan Lancar

Dirjen Migas Hadiri Pengukuhan Pengurus ADPM

Dirjen Migas Lantik Puluhan ASN Ditjen Migas

Dampingi Menteri ESDM, Dirjen Migas Kunjungi Proyek Banyu Urip

Terkendala Pandemi Covid-19, Pemerintah Tetap Dorong Proyek JTB Onstream Tahun Ini

Kunjungi Jambi, Dirjen Migas Rasakan Pengalaman Langsung Gunakan Jargas

Dirjen Migas Pimpin Sosialisasi Kepmen ESDM tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas

Menteri ESDM Lantik Direktur Pembinaan Program Migas Baru

Halalbihalal Virtual Ditjen Migas: Tekankan Pandai Bersyukur dan Tawakal

Libur Lebaran, Pasokan BBM dan LPG Aman

Rampung, Pengadaan Lahan dan BED Kilang Tuban

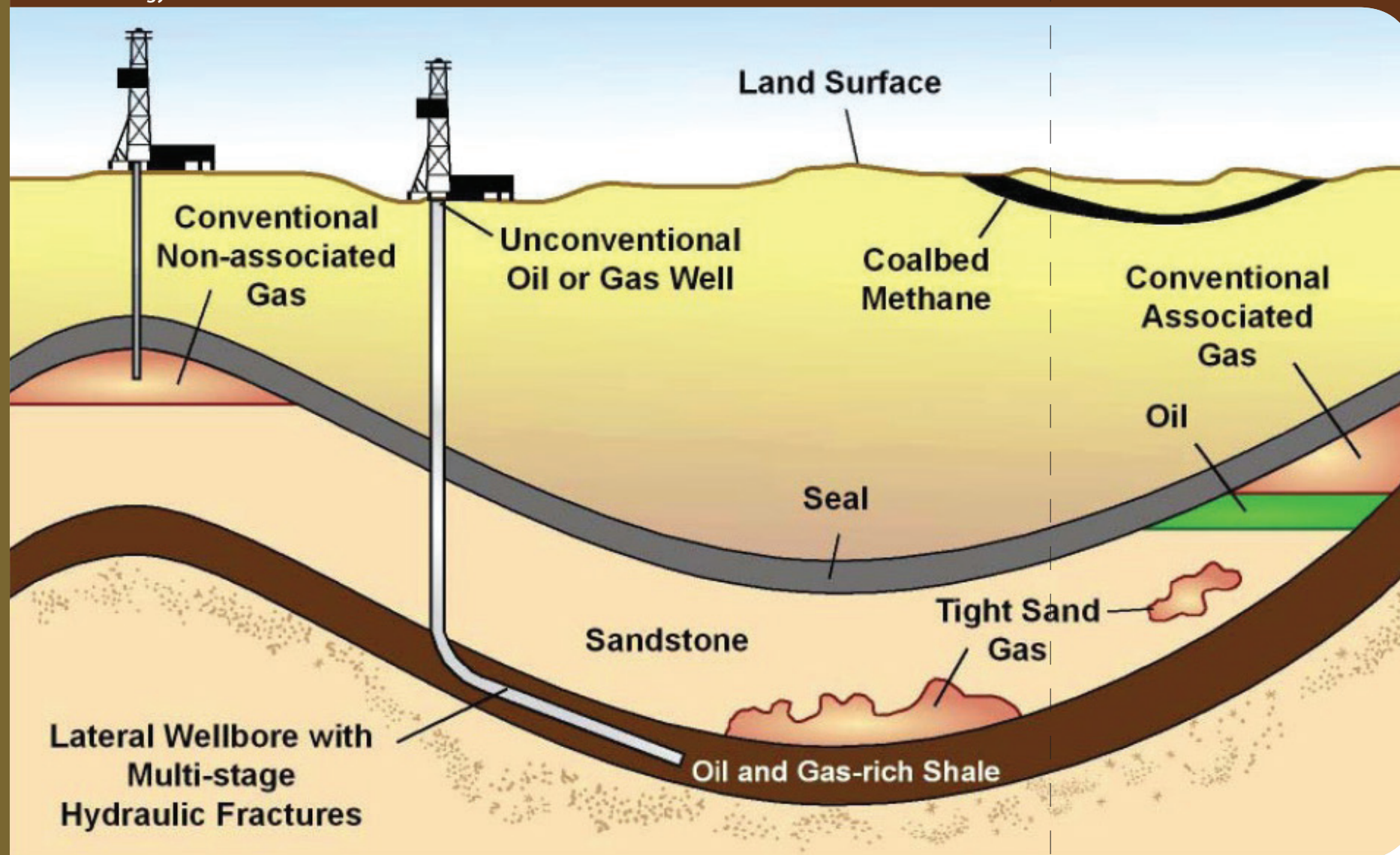
Sesditjen Migas Serahkan Bingkisan Lebaran dan Medical Kit

Jelang Idul Fitri 1442 H, Dirjen Migas Teken Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi

Potensi Besar, Pemerintah Kembangkan Migas Non Konvensional

Potensi migas non konvensional di Indonesia terbilang besar. Oleh sebab itu, Pemerintah akan terus menggali potensi migas non konvensional di Indonesia dengan berbagai cara dan upaya.

The Geology of Conventional and Unconventional Oil and Gas



“

Kita perlu lihat lagi di sana dan secara teori, potensinya diperkirakan sangat besar.”

Tutuka Aridji

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Pemerintah berkomitmen akan memfasilitasi kerja sama tersebut.

“Khusus untuk minyak non konvensional, kita harapkan lembaga-lembaga internasional bisa datang ke Indonesia karena tampaknya potensinya juga sudah diketahui oleh mereka. Kita akan memfasilitasi secara langsung supaya lebih detail, lebih akurat sehingga banyak menghasilkan (migas),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Aridji dalam wawancara virtual dengan CNBC, Senin (18/01/2021).

Menurut Tutuka, potensi migas non konvensional Indonesia terbilang besar, terutama di Sumatera basin.

Untuk memastikan potensi migas non konvensional ini, perlu dilakukan pengeboran di lokasi-lokasi tersebut. Pemerintah mengharapkan pengeboran dapat dilakukan tahun ini atau setidaknya tahun depan.

“Pengeboran sangat penting untuk membuktikan karena potensi tersebut bisa lebih besar dari migas konvensional,” tukas Tutuka.

Coal Bed Methane dan Shale Gas/Oil potensial

Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan migas non konvensional yang potensial untuk dikembangkan ialah Coal Bed Methane sebesar 453 TCF dan Shale Gas 574 TCF. Pada kesempatan berbeda, Tutuka menyampaikan Pemerintah berfokus pada shale oil.

Dia melanjutkan, secara teori, apabila terdapat reservoir minyak di suatu tempat, pasti ada “dapur”. Inilah yang dikejar Pemerintah.

“Dapur itu sudah diketahui tempatnya di mana. Dapurnya namanya non konvensional. Kita sudah petakan di mana tempatnya dan kita mau fokus ke satu tempat (shale oil),” tambah Tutuka.

Hal senada juga pernah dikemukakan mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar beberapa waktu silam. Menurut dia, Indonesia dinilai memiliki potensi shale gas dan shale oil yang besar, namun belum dimanfaatkan sama sekali.

Minyak serpih (shale oil), juga disebut Kerogen serpih (bitumen padat), adalah batuan sedimen berbutir halus yang mengandung kerogen (campuran dari senyawa-senyawa kimia organik) yang merupakan sumber terbentuknya minyak serpih yang merupakan hidrokarbon cair. Shale oil didefinisikan sebagai batuan sedimen ‘immature’, berbutir halus yang mengandung sejumlah besar material organik yang spesifik yaitu alginit dan/atau bituminit, yang apabila diekstraksi dengan dipanaskan (> 550 derajat celcius) akan menghasilkan minyak yang mempunyai potensi ekonomis.

Memiliki karakteristik berbeda dengan migas konvensional

Pengembangan migas non konvensional merupakan bagian strategi untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030. Namun, satu hal yang perlu dicermati adalah pengembangan migas non konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas konvensional di mana keberhasilan eksplorasi menjadi salah satu kunci sukses utama.

Migas non konvensional yang telah berhasil dikembangkan salah satunya di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2006. Sementara itu,



minyak non konvensional mulai dikembangkan di Indonesia tahun 2008 melalui penandatanganan Wilayah Kerja (WK) Sekayu.

Sayangnya, perkembangannya belum menggembirakan. Dari 54 kontrak WK Gas Metana Batubara yang ditandatangani mulai 2008-2012, saat ini tersisa 20 WK eksisting. Sedangkan enam kontrak minyak non konvensional yang ditandatangani 2013-2016, tersisa empat minyak non konvensional eksisting. Sementara mulai 2017 hingga saat ini, tidak terdapat tanda tangan kontrak WK minyak non konvensional.

Belum memuaskannya perkembangan minyak non konvensional di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karakteristik batuan yang berbeda sehingga menyebabkan teknologinya yang berbeda pula. Dengan kata lain, teknologi yang digunakan di negara tersebut tidak serta-merta dapat digunakan di Indonesia karena karakteristik batuan yang berbeda.

Tutuka mengungkapkan, karakteristik batuan minyak non konvensional di Indonesia yang sedikit agak

liat, menjadikan teknologi yang digunakan di Amerika Serikat perlu disesuaikan.

“Karakteristik batuan minyak non konvensional di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menggunakan teknologi yang di Amerika Serikat. Perlu ada adjustment karena menurut informasi, batuan minyak non konvensional kita lebih agak liat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada teknologi yang dapat digunakan untuk pilot project, yakni multi-stage fractured horizontal (MSFH). Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan dana komitmen kerja pasti (KKP) atau cost recovery. Estimasi biaya per sumur sekitar US\$ 22 juta.

“Penentuan lokasi pilot project harus dikaji betul karena biayanya sangat mahal. Diharapkan dari pemboran ini kita bisa memperoleh data yang berguna. Kita akan pakai sebagai proof of concept,” pesan Tutuka.

Untuk lebih mengembangkan minyak non konvensional ini, Tutuka menilai perlu dilakukan studi yang lebih

mendalam agar diperoleh data yang lebih mendetil.

Dukungan infrastruktur juga diperlukan dalam pengembangan minyak non konvensional ketika dilakukan massive fracturing.

“Ketika dilakukan massive fracturing, skala rekahannya besar. Jadi, perlu infrastruktur yang memadai di permukaan,” tambahnya.

Dukungan regulasi

Upaya lainnya untuk mendorong pengembangan minyak non konvensional adalah melalui dukungan regulasi. Saat ini, Pemerintah tengah menggodok aturan di mana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mengusahakan migas konvensional, juga dapat mengusahakan wilayah kerja (WK) minyak non konvensional.

“Jadi struktur yang ada di bawahnya, bisa diusahakan juga oleh WK di atasnya. Tidak perlu ada WK baru. Ini aturan yang sedang kita perbarui untuk menarik investasi. Aturan ini bertujuan kalau ada KKKS yang mengusahakan

WK konvensional, kemudian dia melakukan kajian lebih dalam lagi dan menemukan non konvensional hidrokarbon seperti shale oil atau shale gas, maka (KKKS) bisa langsung mengupayakan (kelola). Tidak harus ada WK baru, seperti pada aturan sebelumnya,” papar Tutuka di kesempatan lainnya.

Dalam aturan sebelumnya, lanjut Tutuka, KKKS tidak diperbolehkan mengelola WK migas konvensional dan minyak non konvensional sekaligus. Untuk masing-masing kegiatan tersebut, harus memiliki WK tersendiri.

“Dulu tidak boleh dalam WK yang sama, ada migas non konvensional dan non konvensional. Jadi, WK konvensional tersendiri. Sekarang, satu WK bisa mengupayakan dua jenis sekaligus,” tambahnya.

Kontrak yang digunakan, tetap menggunakan kontrak sebelumnya, namun akan dilakukan amandemen. Untuk split atau bagi hasil minyak non konvensional, besarnya juga bisa berbeda dengan kontrak migas konvensional.

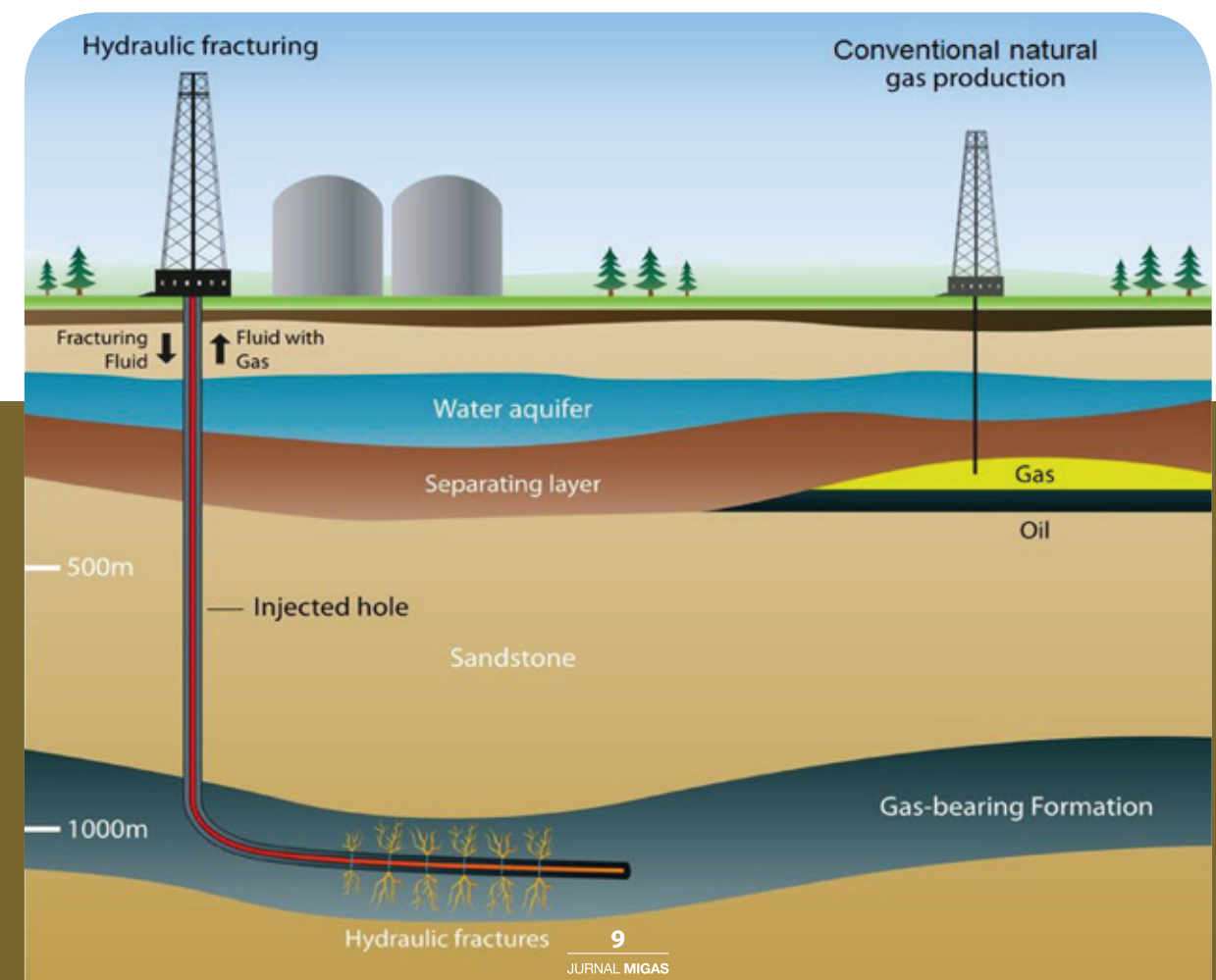
Lebih lanjut Tutuka memaparkan, KKKS yang di WK migasnya teridentifikasi mengandung minyak non konvensional, wajib melakukan studi. Apabila hasil studi menunjukkan potensi minyak non konvensional besar, maka harus dikembangkan.

“Kalau potensinya (minyak non konvensional) besar, harus dikembangkan. Studi wajib dilakukan untuk menentukan besaran potensinya,” tegas Tutuka.

Aturan baru yang diharapkan dapat meningkatkan pengembangan

minyak non konvensional ini, telah disosialisasikan kepada KKKS. Sebagian besar KKKS menyambut positif rencana ini, namun ada juga yang sebaliknya.

“Sambutan dari KKKS, ada yang mengatakan bagus, ada sebagian kecil tidak positif. Tapi kebanyakan positif. Ini kan sudah kajian lama dari kelompok yang menggabungkan migas konvensional dan non konvensional. Sudah lama dikaji, kenapa minyak non konvensional tidak berkembang? Salah satu masalahnya, kalau ketemu minyak non konvensional, dia tidak bisa ngebor (karena harus ada WK baru). Akhirnya berhenti (mengebor). Sekarang harapannya kalau dia (mengelola minyak non konvensional) pakai WK dengan aturan baru tersebut, bisa sekaligus mengusahakannya,” kata Tutuka. ●





Kembangkan MNK, Pemerintah Siapkan Tiga Rencana

Pemerintah terus berupaya mengembangkan migas non konvensional (MNK). Setidaknya, ada tiga rencana yang telah disiapkan untuk pengembangan MNK di tanah air.

Ketiga rencana salah satunya ialah revisi/penghapusan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 dan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2012. Dalam aturan baru nantinya, wilayah kerja (WK) eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi MNK tanpa kontrak baru. Aturan ini juga telah disosialisasikan dengan stakeholder, termasuk IPA pada 17 Maret 2021.

“Revisi aturan ini artinya di WK yang sama, tidak perlu izin baru lagi. Sudah bisa melakukan pengusahaan WK MNK. Ini perubahan yang paling mendasar,” papar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji saat menjadi pembicara dalam Webinar tentang

MNK yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero) awal Mei lalu.

Rencana kedua adalah pelaksanaan studi MNK di seluruh WK aktif. SKK Migas diharapkan melakukan inventarisasi WK eksplorasi atau eksploitasi. Studi pada WK tersebut untuk menentukan tingkat potensi MNK. Setelah diketahui potensinya, KKKS dapat langsung melakukan pengeboran produksi.

Rencana ketiga adalah pilot project produksi MNK di WK potensial. Pemerintah menargetkan pilot project MNK dengan aturan baru sudah dapat dilakukan pada tahun ini.

“Pilot project harus dilakukan segera. Kalau tahun ini tidak bisa, paling

tidak tahun ini sudah harus bisa menentukan lokasi pilot project di mana. Pemborannya di mana,” katanya.

Pengembangan MNK diharapkan dapat mendukung pencapaian target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BCFD pada tahun 2030. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi MNK di Indonesia yaitu CBM sekitar 453,30 TCF dan shale gas 574 TCF.

Siapkan tiga rencana

Setidaknya, ada tiga rencana yang telah disiapkan untuk pengembangan migas non konvensional di tanah air. Ketiga rencana itu salah satunya ialah revisi/penghapusan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 dan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2012. Dalam aturan baru nantinya, wilayah kerja (WK) eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi MNK tanpa

kontrak baru. Aturan ini juga telah disosialisasikan kepada stakeholder, termasuk IPA pada 17 Maret 2021.

“Revisi aturan ini artinya di WK yang sama, tidak perlu izin baru lagi. Sudah bisa melakukan pengusahaan WK migas non konvensional. Ini perubahan yang paling mendasar,” papar Tutuka Ariadji saat menjadi pembicara dalam webinar tentang migas non konvensional yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero) awal Mei lalu.

Rencana kedua adalah pelaksanaan studi migas non konvensional di seluruh WK aktif. SKK Migas diharapkan melakukan inventarisasi WK eksplorasi atau eksploitasi. Studi pada WK tersebut untuk menentukan tingkat potensi migas non konvensional. Setelah diketahui potensinya, KKKS dapat langsung melakukan pengeboran produksi.

Rencana ketiga adalah pilot project produksi migas non konvensional di WK potensial. Pemerintah menargetkan pilot project MNK dengan aturan baru sudah dapat dilakukan pada tahun ini.

“Pilot project harus dilakukan segera. Kalau tahun ini tidak bisa, paling tidak tahun ini sudah harus bisa menentukan lokasi pilot project di mana. Pemborannya di mana,” katanya.

Pengembangan migas non konvensional diharapkan dapat mendukung pencapaian target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BCFD pada tahun 2030. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi migas non konvensional di Indonesia, yaitu CBM sekitar 453,30 TCF dan shale gas 574 TCF. ●





Mendukung Pengembangan CCUS di Sektor Migas

Meskipun saat ini Pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun sejumlah agenda strategis tetap berlanjut. Salah satunya adalah penurunan gas rumah kaca. Penurunan gas rumah kaca bisa terwujud melalui berbagai cara, seperti mengembangkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) atau sering juga disebut Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).

Pengembangan teknologi CCUS merupakan bagian komitmen Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030. Penerapan CCUS mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) dari bahan bakar fosil, termasuk sektor minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2016, Indonesia telah secara resmi meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) dan menetapkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam dokumen yang dikenal dengan National Determined Contribution/

NDC. Pada dokumen NDC, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 29% melalui usaha sendiri, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Dalam target NDC tersebut, sektor energi setidaknya memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 314 juta ton CO₂e. Usaha dekarbonisasi pada sektor energi, terutama kegiatan CCS/CCUS memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian NDC.

Solusi penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam The 3rd East Asia Energy Forum akhir tahun lalu mengungkapkan, saat ini CCUS menjadi bahasan penting di tingkat global untuk mengurangi emisi CO₂ dan menggunakannya kembali untuk meningkatkan pemulihan minyak di ladang yang sudah habis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji dalam Webinar CCS/CCUS, Senin (26/04/2021), mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

berperan memastikan bahwa komitmen pengurangan emisi CO₂ dapat terpenuhi.

“Kami mendukung penuh penerapan CCUS di sektor migas melalui Enhanced Oil Recovery (EOR)/Enhanced Gas Recovery (EGR). Teknologi ini diperlukan untuk mengembangkan ladang migas yang mengandung CO₂ tinggi, meningkatkan produksi, dan mengurangi emisi. CCUS bisa menjadi solusi untuk menyediakan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Tutuka.

Penerapan CCUS juga terkait dengan target Pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030 dengan mengoptimalkan produksi lapangan yang ada, mencari cadangan baru melalui eksplorasi, dan meningkatkan migas nasional produksi melalui EOR/EGR.

Saat ini, Pemerintah sedang merumuskan peraturan terkait penetapan harga karbon. Draft aturan ini sedang dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara.

Tak hanya itu, Pemerintah juga melanjutkan proses penyusunan regulasi terkait CCS/CCUS yang sebelumnya telah dirintis oleh Center of Excellence CCS/CCUS dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB).

“Kami berharap, regulasi tersebut dapat mendukung pemangku kepentingan dalam mengembangkan teknologi CCUS di Indonesia. Tidak hanya dari sisi aspek teknis, tetapi juga dari keamanan dan ekonomi,” tambah Dirjen Migas.

Sebelumnya, untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS di Indonesia, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) membentuk National Center

of Excellence CCS/CCUS yang menjadi wadah pengembangan kapasitas nasional dalam penguasaan aspek teknis, keselamatan, ekonomi, sosial, serta aspek regulasi dari kegiatan CCS/CCUS. Dalam pelaksanaan Center of Excellence CCS/CCUS tersebut, LEMIGAS dan ITB ditunjuk sebagai pelaksana utama.

Sejumlah penelitian telah, sedang, dan akan dilakukan

Dalam pengembangan teknologi CCUS, Pemerintah bersama stakeholder terkait telah, sedang, dan akan melakukan sejumlah penelitian. Sejumlah studi yang dimaksud antara lain:

- CCUS Gundih oleh Center of Excellence ITB, JANUS dengan dukungan Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang.
- Tangguh EGR di Papua Barat oleh BP Indonesia.
- Sukowati di Jawa Timur oleh PT Pertamina (Persero) dan didukung oleh Center of Excellence LEMIGAS, JAPEX, dan METI.
- Limau Niru di Sumatera Selatan oleh Center of Excellence LEMIGAS, JAPEX dengan dukungan METI.
- Studi CCUS di sektor hilir juga akan segera dimulai, seperti sebagaimana mengelola CO₂ yang dihasilkan dari Pabrik Amonia di Sulawesi Tengah.

“Selain itu, KKS juga tertarik untuk mengembangkan CCS/CCUS di lapangannya seperti Wilayah Kerja (WK) Sakakemang oleh Repsol dan Lapangan Abadi oleh INPEX,” lanjut Tutuka.

Memang, Ditjen Migas mengungkapkan, fokus pada CCUS untuk meningkatkan produksi migas melalui CO₂-EOR/EGR. Namun demikian, juga mendukung pengembangan daur ulang karbon karena bisa memberikan nilai ekonomi dari pemanfaatan CO₂. Di

Indonesia, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Balitbang ESDM, saat ini sedang mempersiapkan kerja sama dengan Jepang terkait daur ulang karbon. Pertamina juga memiliki beberapa program penelitian terkait daur ulang karbon.

Selain studi CCUS per lapangan, di Indonesia juga telah dilakukan studi CO₂ Source-Sink Match, khususnya di area Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh Center of Excellence ITB. Studi ini dilaksanakan untuk memetakan sumber CO₂ dan lapangan yang berpotensi untuk dilakukan injeksi CO₂. Sumber CO₂ ini tidak hanya dari lapangan migas, melainkan juga dari pembangkit listrik dan industri lainnya. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam memetakan sumber CO₂ dan potensi lokasi injeksi CO₂ terdekat serta membuka kemungkinan untuk dibuat sistem clustering/hub sehingga injeksi dapat dilakukan dari beberapa sumber CO₂ ke beberapa lokasi yang berdekatan.

”

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan CCUS membutuhkan kerja sama dengan semua pihak, baik Center of Excellence CCS/CCUS, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga terkait serta Lembaga Internasional. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan selalu mendukung stakeholder yang ingin mengembangkan teknologi CCUS untuk diterapkan di Indonesia.”

Tutuka Aridji

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Large Carbon Capture & Storage (CCS) Technology Hubs



Potential to develop 2 clusters of large CCS technology Hub in collaboration with other government & private industry sectors in the following locations:

1. CO₂ source can be derived from Merbau, South Jambi, Sakakemang, Arung – Nowera, Singa, Tj. Enim DME gasification plant and other industries who emit CO₂ to be injected in South Sumatra Basin.
2. CO₂ source can be derived from Cilamaya, Subang, Jatibarang and other industries who emit CO₂ to be injected in North - West Java Basin.

✓ Subang	: PT Pertamina EP ± 16% CO ₂	✓ Matindok	: PT Pertamina EP ± 3% CO ₂
✓ Cilamaya	: PT Pertamina EP ± 30% CO ₂	✓ Senoro	: JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi ± 3% CO ₂
✓ Jatibarang	: PT Pertamina EP ± 23% CO ₂	✓ South Jambi	: ConocoPhillips South Jambi Ltd. ± 60% CO ₂
✓ Merbau	: PT Pertamina EP ± 12% CO ₂	✓ Singa	: Medco E&P ± 38% CO ₂
✓ Gundih	: PT Pertamina EP ± 20% CO ₂	✓ Kuala Langsa	: Medco E&P ± 81% CO ₂
✓ Jambaran Tiung Biru	: PT Pertamina EP ± 35% CO ₂	✓ Alur Siwah	: Medco E&P 27.5% CO ₂
✓ East Natuna	: PT Pertamina EP ± 80% CO ₂	✓ Arung - Nowera	: Medco E&P 60% CO ₂
✓ Tangguh	: BP (Berau) Ltd. ± 12% CO ₂	✓ Sakakemang	: Repsol ± 26%*

Source: Kementerian ESDM, SKK Migas

CCUS RTI PT. Pertamina (Persero) – Confidential & Proprietary

Mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan

Tutuka mengungkapkan, CCUS merupakan salah satu solusi teknologi yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan sekaligus dapat meningkatkan produksi migas melalui EOR/EGR. Sumber CO₂ dapat diperoleh dari lapangan migas yang mengandung kadar CO₂ tinggi, dari pembangkit maupun dari industri lainnya.

CCS pada intinya adalah sebuah teknologi untuk menangkap emisi CO₂ yang dapat bersumber dari lapangan migas, pembangkit listrik, atau industri lainnya. Kemudian, menginjeksikan CO₂ tersebut ke dalam lapisan geologi bawah

permukaan tujuan pengimanan (storage). Sementara pada kegiatan CCUS, CO₂ dimanfaatkan (utilization) untuk meningkatkan produksi migas melalui EOR/EGR.

Rencana implementasi CCS/CCUS di sektor migas berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil sementara pada studi kelayakan CCS/CCUS yang sedang dilaksanakan, terdapat potensi reduksi emisi CO₂ mencapai total ±48 juta ton CO₂, yang berasal dari Lapangan Gundih (± 3 juta ton CO₂), Lapangan Sukowati (±15 juta ton CO₂) dan Lapangan Tangguh (±30 juta ton CO₂). Implementasi teknologi CCUS pada lapangan migas merupakan bentuk upaya mitigasi emisi GRK yang akan menurunkan level emisi sehingga operasi migas

dapat berkembang menjadi kegiatan yang lebih hijau, dan tentunya mendukung pencapaian target penurunan emisi Indonesia pada NDC.

Sektor migas memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi CCS/CCUS, karena lapangan migas dapat berfungsi sebagai storage raksasa yang dapat menyimpan CO₂ dalam jumlah yang sangat besar.

Selain itu, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen Migas, juga berperan aktif pada berbagai forum diskusi terkait CCUS yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, di antaranya International Energy Agency dan Global CCS Institute. ●

Komitmen Terapkan GCG, Menteri ESDM Teken Aturan Pengendalian Gratifikasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menerapkan *good corporate governance* (GCG). Komitmen itu antara lain bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM.



“Untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan,” kata Menteri ESDM dalam pertimbangannya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi, sehingga perlu diganti. Dengan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM menetapkan Permen ESDM tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Dinyatakan dalam Bab I, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Bab II yang mengatur tentang Ruang Lingkup, dinyatakan bahwa Permen ini merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi bagi pegawai Kementerian ESDM dan penyelenggara negara.

Kemudian dinyatakan dalam Bab III Pasal 3 ayat 1, pegawai Kementerian ESDM dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal pegawai Kementerian ESDM dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menolak gratifikasi, wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) atau secara langsung kepada KPK,” demikian bunyi Pasal 3 ayat 2.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak meliputi: gratifikasi yang tidak diterima secara langsung, gratifikasi yang tidak diketahui pemberinya, gratifikasi yang diragukan kategorinya oleh penerima, dan/atau gratifikasi dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar institusi dan/atau membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

“Pegawai KESDM dan penyelenggara negara dilarang memberikan gratifikasi yang dianggap suap dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya,” tegas Pasal 4.

Gratifikasi yang diterima oleh pegawai KESDM dan penyelenggara negara, dikategorikan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan ini meliputi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, antara lain pemberian dalam keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Selain itu, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham

pribadi yang berlaku umum dan manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum.

Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Menteri membentuk UPG Kementerian yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal. UPG Kementerian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh UPG Unit yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau yang membawahi

unit pelaksana teknis sesuai kewenangan masing-masing.

Penerima gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasi kepada UPG Kementerian atau UPG Unit dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima atau KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi yang tercantum dalam laporan gratifikasi dalam hal memerlukan uji orisinalitas dan/

atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis. Laporan gratifikasi yang telah diterima dari pelapor dilakukan verifikasi oleh UPG Unit atau UPG Kementerian yang menerima laporan Gratifikasi untuk diperiksa kelengkapannya. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi laporan gratifikasi dinyatakan tidak lengkap, UPG Kementerian atau UPG Unit yang menerima laporan gratifikasi mengembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi.

UPG Unit meneruskan laporan gratifikasi yang dilengkapi dengan

LHAPG kepada UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima dari pelapor. UPG Kementerian melakukan revidu terhadap LHAPG yang disampaikan UPG Unit dan dapat melakukan koreksi apabila hasil analisis UPG Unit dianggap tidak tepat.

Dinyatakan pula dalam aturan ini, penyampaian laporan gratifikasi ke KPK oleh UPG Kementerian untuk dilakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilaksanakan secara online melalui laman gol.kpk.go.id. ●



Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Joko Widodo Teken Perubahan Atas Perpres Penetapan Harga Gas Bumi

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Aturan ini bertujuan antara lain mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi, serta untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif.

Dalam Perpres yang ditetapkan 28 Desember 2020 ini, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) diubah.

Ketentuan angka 2 dan angka 3 dalam Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 angka yakni angka 8 dan angka 9, sehingga menjadi: Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2. Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan gas bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
3. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi kepada pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin



Usaha Niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga gas bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Kontak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.
8. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
9. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian

bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

Perubahan juga dilakukan pada Pasal 3 ayat 1 dan di antara ayat 1 dan 2 disisipkan 1 ayat yakni ayat 1a, sehingga berbunyi:

1. Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi US\$ 6/ MMBTU.
- 1a. Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengguna gas bumi dengan ketentuan pengguna gas bumi membeli gas bumi di titik serah pengguna gas bumi (plant gate), termasuk gas bumi yang berasal dari Liquefied Natural Gas (LNG) atau Compressed Natural Gas (CNG), dengan harga lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU.
2. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan gas bumi bagi industri pengguna gas bumi.



- b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Sementara pada Pasal 4, ketentuan ayat 2 diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat 3 sehingga berbunyi:

1. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang:
 - a. industri pupuk
 - b. industri petrokimia
 - c. industri oleochemical
 - d. industri baja
 - e. industri keramik
 - f. industri kaca
 - g. industri sarung tangan karet.
2. Perubahan bidang industri yang dapat diberikan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden.
3. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada pengguna gas bumi yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a).

Ketentuan Pasal 5 diubah:

1. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. harga gas bumi yang dibeli dari Kontraktor; dan/atau
 - b. tarif penyaluran gas bumi.
2. Dalam perhitungan penyesuaian untuk penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. mempertimbangkan rekomendasi perhitungan

- b. penyesuaian harga gas bumi dari SKK Migas dan BPMA
- b. mempertimbangkan rekomendasi perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dari Badan Pengatur
- c. meminta pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara terkait perhitungan penyesuaian penerimaan negara.
3. Rekomendasi perhitungan penyesuaian harga gas bumi dari BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya diperlukan untuk gas bumi yang berasal dari darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (o sampai dengan 12 mil laut).
4. Penyesuaian harga gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan.
5. Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan.
6. Penerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) telah memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Kontraktor.
7. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian harga gas bumi yang dijual kepada pengguna gas bumi sesuai dengan penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

8. Penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha gas bumi.
9. Badan usaha yang menyalurkan gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan insentif secara proporsional oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan penyesuaian untuk penetapan Harga Gas Bumi Tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan pengguna gas bumi yang memperoleh Harga Gas Bumi Tertentu, setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Koordinasi yang paling sedikit beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. ●

Database Mutakhir Dorong Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melakukan pemutakhiran database pipa penyalur kegiatan minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai wilayah Republik Indonesia. Penataan alur pipa dan kabel bawah laut di Indonesia bertujuan untuk menata ruang wilayah laut Indonesia agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

Dalam Sosialisasi Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, Senin (22/03/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menyampaikan, "Penataan alur pipa dan kabel bawah laut ini sudah hampir dua tahun kita kerjakan dan mulai hari ini, perlahan kita mampu memetakan alur pipa dan kabel bawah laut yang selama ini mungkin belum tertata rapi dan bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini menjadi prestasi bangsa yang menunjukkan kehadiran dan kedaulatan negara kita di laut yang kita miliki".

Dirintis sejak beberapa tahun silam Upaya menata alur pipa dan kabel bawah laut di Indonesia telah dirintis sejak beberapa tahun silam. Hal ini diperkuat dengan pembentukan Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut yang telah dibentuk, dalam waktu kurang dari setahun telah berhasil menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut, yang terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut dan 209 BMH (beach main hole), termasuk 4 lokasi landing stations sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel atau pipa yang menggunakan perairan Indonesia, yaitu Batam, Manado, Kupang dan Jayapura.

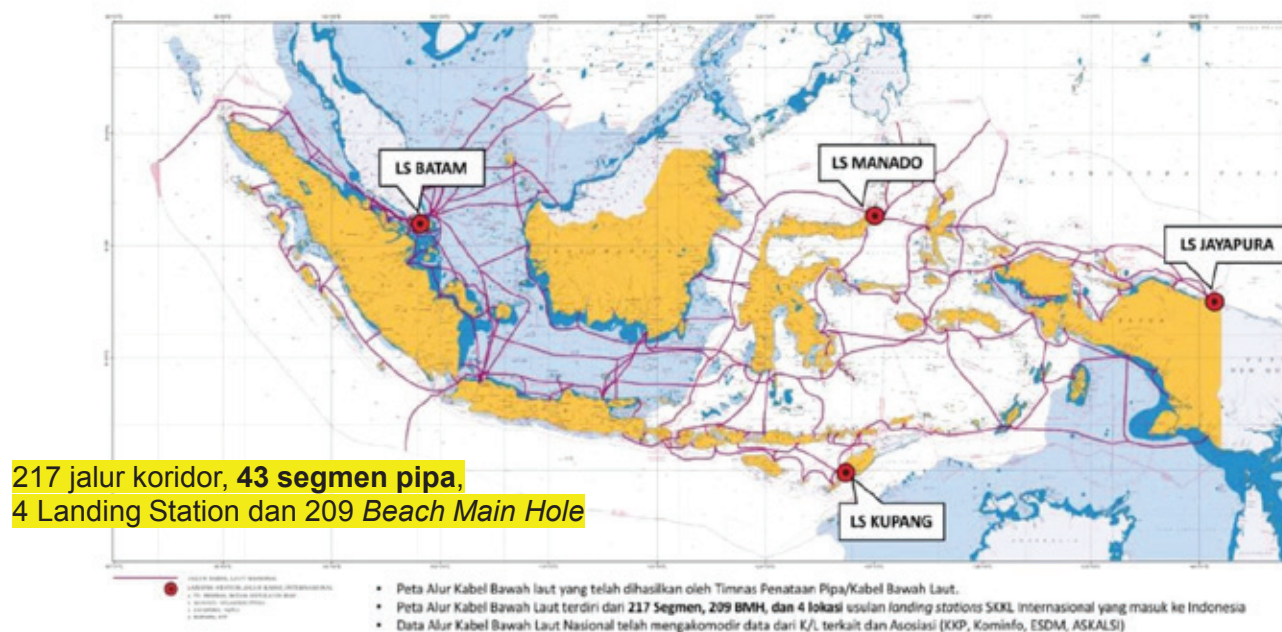
Sejak terbentuknya Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, dalam waktu kurang dari setahun telah berhasil menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut, yang terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut, dan 209 BMH (beach main hole), termasuk empat lokasi landing stations sebagai

tempat masuk dan keluarnya kabel atau pipa yang menggunakan perairan Indonesia, yaitu Batam, Manado, Kupang, dan Jayapura.

Tak hanya membentuk tim nasional, berbagai upaya tindak lanjut menata alur pipa dan kabel bawah laut di Indonesia terus dilakukan hingga sekarang. Salah satunya ialah pemutakhiran database pipa penyalur migas. Pemutakhiran database ini dibahas dalam rapat virtual pada Kamis (18/03/2021). Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji serta dihadiri oleh Badan Usaha (BU) atau Bentuk usaha Tetap (BUT) yang mengoperasikan instalasi pipa penyalur di laut.

Terdapat pula sejumlah narasumber di antaranya Koordinator Kawasan Antarwilayah Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arif Widiyanto, Pushidrosal Kadisnautika Letkol Laut Bambang Marwoto, serta Letkol Laut Sinung Budi P.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid Hasyim memaparkan, pipa dan kabel bawah laut merupakan obyek vital nasional yang harus dijaga dan dikelola. Kendati demikian, ia melihat saat ini belum semua pipa dan atau kabel bawah laut yang sudah tergelar telah digambarkan pada Peta Laut Indonesia.



Rencana tata ulang dan zonasi Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dilakukan penataan ulang ke dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan dan efektivitas pemanfaatan ruang perairan laut untuk kepentingan lainnya. Termasuk juga pipa penyalur dalam kegiatan migas.

“Terkait penataan tersebut, dibentuk Tim Nasional di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertindak sebagai salah satu Anggota Tim Pengarah dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertugas sebagai Anggota Tim Pelaksana dari Kementerian ESDM, serta Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan sebagai Anggota Tim Teknis,” jelasnya.



Diharapkan ke depan, ini (gasifikasi batu bara) masif dilakukan sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap impor LPG. Ini merupakan cerminan ketahanan energi nasional yang berlandaskan pada bahan baku lokal,”

Arifin Tasrif, Menteri ESDM

Wakhid pun menyampaikan agar BU atau BUT dapat melengkapi data teknis dan koordinat jalur pipa penyalur baik yang beroperasi maupun tidak beroperasi. Ia menambahkan, data teknis yang diminta meliputi jalur pipa penyalur, koordinat per KP, dimensi pipa, tekanan dan temperatur, tahun pembuatan, umur layan desain, kedalaman laut dan Dokumen Daerah Terbatas dan Terlarang (DTT).

Adapun hal ini juga ia sampaikan melalui surat No. B-2491/MG.06/DMT/2021 tanggal 10 Maret 2021. Surat ini didasarkan pada arahan Menteri ESDM dan Dirjen Migas berdasar Rakor Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi pada 23 Februari 2021.

“Diharapkan melalui rapat ini, BU atau BUT dapat memperoleh pemahaman terkait data pipa yang kita minta. Apabila diperlukan nantinya, kegiatan serupa ini dapat kita adakan lagi supaya hal-hal yang terkait penataan pipa bawah laut dapat sesuai harapan dan tentunya tidak mengganggu investasi migas,” papar Wakhid.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan pada 18 Februari lalu telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Dalam aturan tersebut dinyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepmen ini.

Diketahui, penetapan alur ini nantinya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut. Adapun alur pipa dan/atau kabel ini dapat dievaluasi satu kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga terkait apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan dan/atau bencana.



“Dalam hal terdapat penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut yang tidak sesuai atau belum tercantum dalam Kepmen ini, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Koordinator Kawasan Antarwilayah Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Arif Widiyanto.

Lebih lanjut Arif mengungkapkan telah disepakati 217 jalur koridor dan 208 beach main hole di seluruh Indonesia.

“Ketika menyusun aturan ini, kami telah meminta data, baik itu kabel-kabel untuk mendeteksi tsunami, listrik, dan pipa bawah laut. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh kementerian dan lembaga, serta BUMN dan asosiasi,” terangnya.

Arif menyampaikan, data yang telah diserahkan Ditjen Migas ke Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya ditelaah kesesuaiannya. Ia menambahkan, terkait Ditjen Migas, telaah yang dilakukan biasanya penetapan lokasi kegiatan migas.

“Kita lakukan telaah, apakah telah sesuai dengan tata laut dan rencana

zonasi. Lokasinya di mana? Kalau di bawah 12 mil, pipanya harus sesuai Perda Pemerintah Provinsi,” tambahnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kebijakan penataan ini dapat dievaluasi lima tahun sekali. Menurut dia, saat ini kondisi penggelaran pipa atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib dan tidak tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi laut.

Singkatnya, kegiatan usaha migas merupakan kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi. Salah satu kegiatan migas adalah kegiatan pengangkutan migas melalui pipa penyalur. Jalur pipa penyalur tersebut beberapa berada di bawah laut yang juga berada di jalur pelayaran. Pipa dan/atau kabel bawah laut yang tergelar dan digambarkan pada Peta Laut Indonesia belum tertata dan perlu diselaraskan dengan Peta Rencana Tata Ruang/Rencana Zonasi. Pemutakhiran database dapat menjadi stimulus dalam penataan alur pipa dan kabel bawah laut. ●





Tekad Kuat Wujudkan WBK/WBBM, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Tanda Tangan Komitmen Bersama



Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih memimpin Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM dalam penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 di Auditorium Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (18/05/2021). Penandatanganan komitmen ini menjadi bukti upaya Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sebelumnya pada tahun 2020, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir

Migas telah memperoleh predikat WBK.

"Tahun kemarin kita sudah mendapat predikat WBK. Tapi kita tetap bersemangat untuk mencapai WBBM," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam kesempatan tersebut.

Dia mengatakan, terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi. Pertama adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Kedua, bebas KKN dan korupsi, serta ketiga adalah meningkatkan pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, lanjut Soerja, harus fokus pada tugas Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas cukup strategis. Antara lain, menjamin ketersediaan bahan bakar, baik untuk masyarakat dan industri yang ramah lingkungan dengan harga yang berkeadilan hingga pelosok tanah air.

"Terkait hal ini, kita harus fokus bagaimana meningkatkan kapasitas produksi BBM, LPG dari dalam negeri. Monitor terus kinerja dari badan usaha

dan fasilitasi kebutuhan badan usaha agar supaya rencana investasi yang ditargetkan dapat tercapai," paparnya.

Tugas lainnya adalah harga BBM yang berkeadilan di seluruh NKRI. Harga BBM Indonesia terendah di wilayah Asia. Pemerintah juga berupaya meluncurkan Program LPG 1 Harga.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.

Unit kerja peraih WBK dan WBBM harus mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Untuk mendapat predikat WBK/WBBM, unit kerja harus memenuhi beragam kriteria yang telah ditetapkan. ●

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Optimis Wujudkan WBBM

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMT) optimis dapat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2021. Berbagai persiapan dan upaya telah, sedang, dan akan dilakukan untuk merealisasikannya.



"Tentu tantangan yang besar ke depan, adanya program WBBM, agar semuanya bisa mendukung dan memberi masukan," tegas Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid Hasyim saat memberi pengarahan kepada para koordinator, sub koordinator hingga staf di unit DMT secara daring, Rabu (19/05/2021).

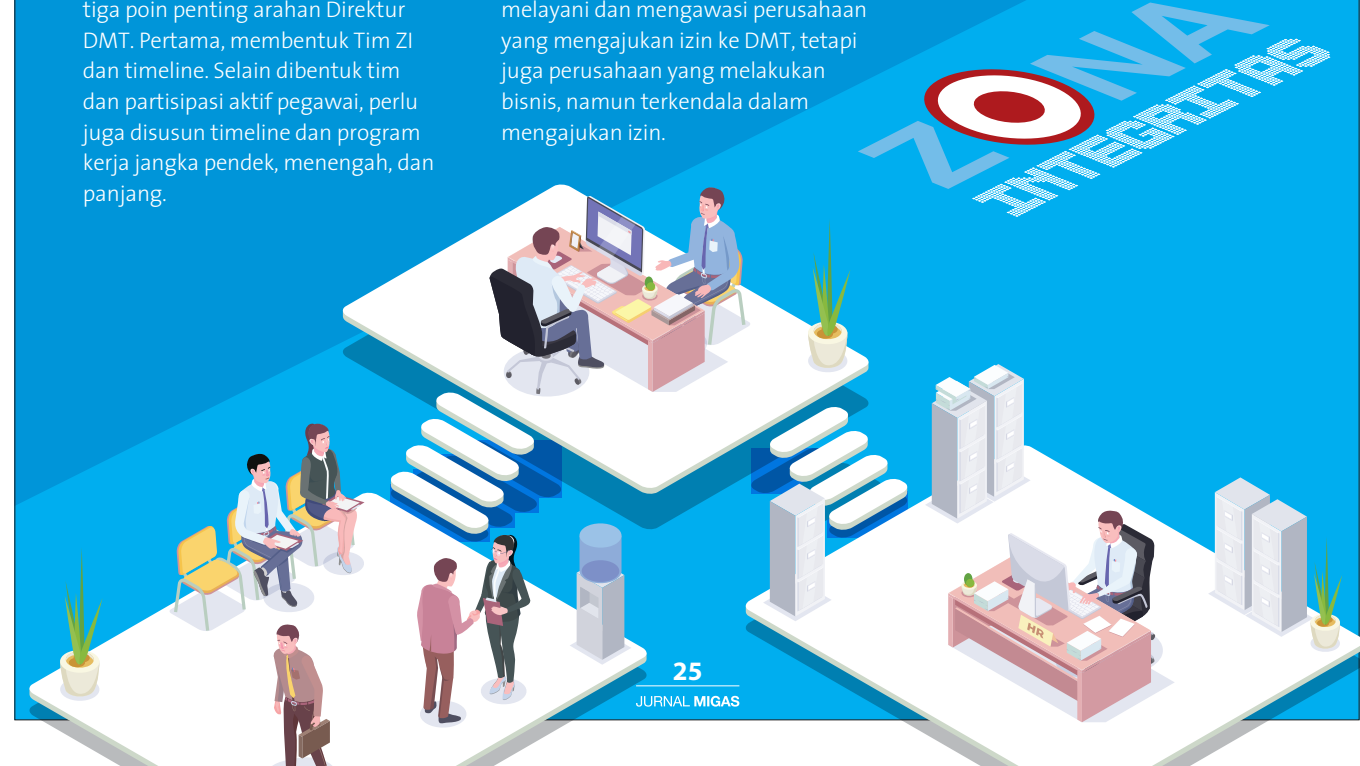
Untuk mewujudkan WBBM di unit DMT, Tim ZI DMT telah merangkum tiga poin penting arahan Direktur DMT. Pertama, membentuk tim dan timeline. Selain dibentuk tim dan partisipasi aktif pegawai, perlu juga disusun timeline dan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kedua adalah pelayanan publik. Artinya, ke depan para pegawai di unit DMT memiliki partisipasi aktif untuk mendengar kebutuhan dan keluhan publik, yang diterima dari kanal pengaduan yang ada, terkait pelayanan di unit DMT. Direktur DMT juga mengharapkan agar tugas dan fungsi unit DMT dapat tersosialisasikan dengan baik melalui website maupun media sosial.

Ketiga, meningkatkan pengawasan. Ke depan, unit DMT akan membuat database yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan. Para pegawai di DMT juga diimbau untuk aktif melakukan pemberitahuan kepada para BU/BUT dan Usaha Penunjang terkait perizinan yang akan habis masa berlakunya. Pegawai di unit DMT ke depan tidak hanya melayani dan mengawasi perusahaan yang mengajukan izin ke DMT, tetapi juga perusahaan yang melakukan bisnis, namun terkendala dalam mengajukan izin.

Dalam kesempatan diskusi, Koordinator Keselamatan Hilir Migas sekaligus Koordinator Tim ZI DMT Wijayanto juga mengingatkan akan pentingnya koordinasi dan komunikasi di internal sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah dengan cepat, dalam konteks peningkatan pelayanan publik.

Pada kesempatan sama, Koordinator Keselamatan Hulu Migas Mirza Mahendra menyampaikan bahwa unit DMT memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten di bidang keselamatan migas. Mirza juga berharap pimpinan dapat mengarahkan para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. ●



Pemilihan dan Desain Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas

Oleh : Onne Aswin Alamsyah dan Arditya Tisha Virgiana
Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM

Sistem alat ukur serah terima minyak dan gas bumi memiliki peran strategis terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Di setiap titik serah terima minyak dan gas bumi perlu terdapat sistem alat ukur minyak dan gas bumi untuk menentukan: keselamatan dan kehandalan operasi serah terima minyak dan gas bumi, akurasi pengukuran, penetapan titik perpindahan hak/kepemilikan dan kewajiban/tanggung jawab atas pengelolaan migas, perlindungan kepentingan para pihak, penerimaan negara/fiskal, serta mendukung dan menumbuhkan SDM, kemampuan rancang bangun dan pemanfaatan potensi dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, alat ukur serah terima harus sesuai dengan kebutuhan dan aturan sehingga pemilihan dan desain sistem alat ukur menjadi suatu yang penting untuk dipahami.

Kata kunci: Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, Serah Terima, Sistem Alat Ukur, Desain

Pendahuluan

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai nomenklatur pada Undang Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 dapat dipisahkan menjadi dua Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kegiatan Usaha Hilir Migas. Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian,

mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Kegiatan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Kegiatan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Kegiatan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

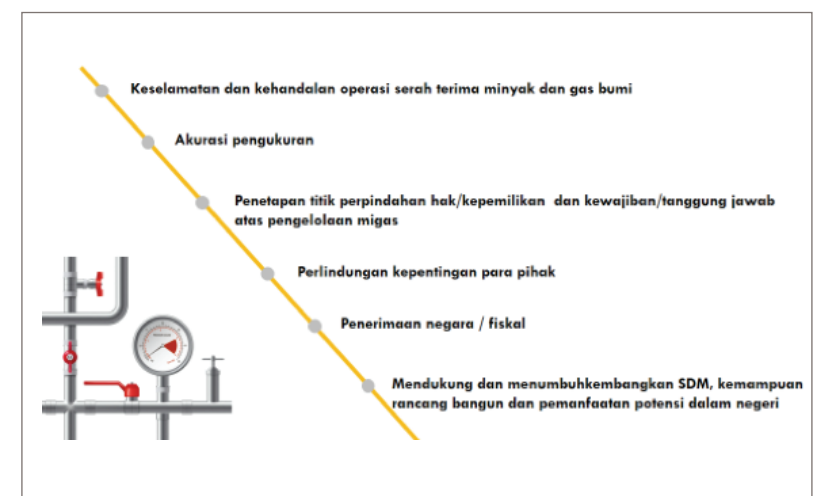
Kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis bagi Indonesia. Selain sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak melalui bonus tanda tangan dan bagi hasil bagian Pemerintah pada sektor hulu Migas, juga pendapatan Negara dalam bentuk tarif pengangkutan gas melalui pipa pada sektor Hilir Migas serta pendapatan berupa Pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) Minyak dan Gas Bumi sektor Hulu dan Hilir. Selain itu kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan sumber pasokan energi utama berupa bahan bakar untuk kegiatan Masyarakat secara luas baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari maupun kegiatan ekonomi mulai dari produksi, logistik sampai konsumsi barang dan jasa. Kemudian, minyak dan gas bumi juga digunakan sebagai sumber bahan bakar pada

kegiatan pembangkitan listrik. Minyak dan gas bumi juga menjadi sumber bahan baku untuk Industri – industri pupuk dan petrokimia serta industri terkait lainnya.

Karena strategisnya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, maka perlu upaya-upaya untuk mendorong optimalisasi nilai kegiatan minyak dan gas bumi. Salah satunya adalah dengan memastikan kuantitas dan kualitas minyak dan gas bumi pada setiap titik serah terima kegiatan Hulu dan Hilir dapat dilakukan seakurat mungkin sehingga perpindahan tanggung jawab dan resiko atas pengelolaan minyak dan gas bumi dari produksi hulu sampai dengan konsumen di hilir memenuhi kaidah akuntabilitas, keteknikan dan keselamatan operasi yang baik.

Nilai Strategis Sistem Alat Ukur Serah Terima Minyak dan Gas Bumi

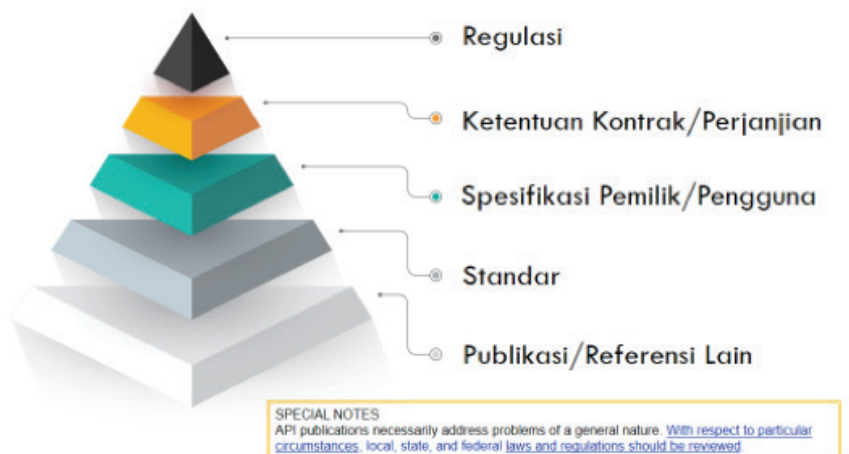
Pemenuhan kaidah akuntabilitas, keteknikan dan keselamatan operasi yang baik pada setiap titik serah terima minyak dan gas bumi merupakan suatu hal yang perlu dipastikan, mengingat pada titik serah terima berperan untuk menentukan: keselamatan dan kehandalan operasi serah terima minyak dan gas bumi, akurasi pengukuran, penetapan titik perpindahan hak/kepemilikan dan kewajiban/tanggung jawab atas pengelolaan migas, perlindungan kepentingan para pihak, penerimaan negara / fiskal, serta mendukung dan menumbuhkan SDM, kemampuan rancang bangun dan pemanfaatan potensi dalam negeri (Gambar 1). Khusus terkait pengeluaran Negara dalam bentuk kebijakan fiskal dalam hal ini adalah pemberian subsidi atas komoditas minyak dan gas bumi, peranan sistem alat ukur juga penting karena besaran subsidi yang harus diberikan Pemerintah ditentukan oleh pengukuran di titik serah terima ke konsumen penerima subsidi.



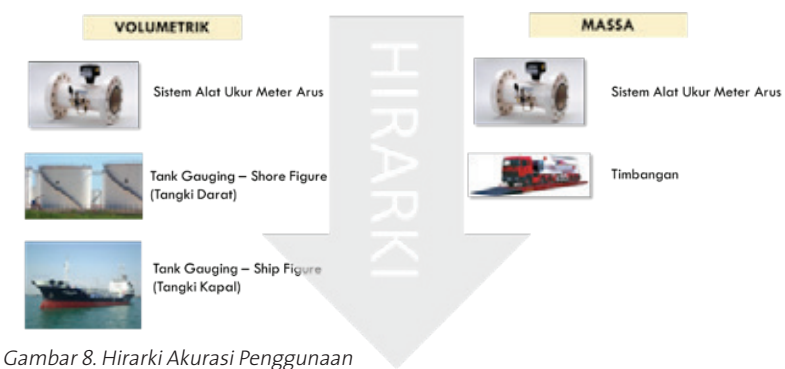
Gambar 1. Nilai Strategis Sistem Alat Ukur Serah Terima pada Kegiatan Usaha Migas

Kaidah – kaidah sebagai acuan bahwa sistem alat ukur serah terima telah didesain, dilakukan inspeksi dan pemeriksaan, dan dioperasikan serta dilakukan pemeliharaan dengan baik harus sesuai standar dan ketentuan yang ada. Kaidah tersebut harus sesuai dengan hirarki sesuai dengan Gambar 2 sebagai berikut: Regulasi, Ketentuan Kontrak/Perjanjian, Spesifikasi milik Badan Usaha, Standar baik SNI maupun standar lain yang umum digunakan pada bidang minyak dan gas bumi serta publikasi/referensi lainnya.

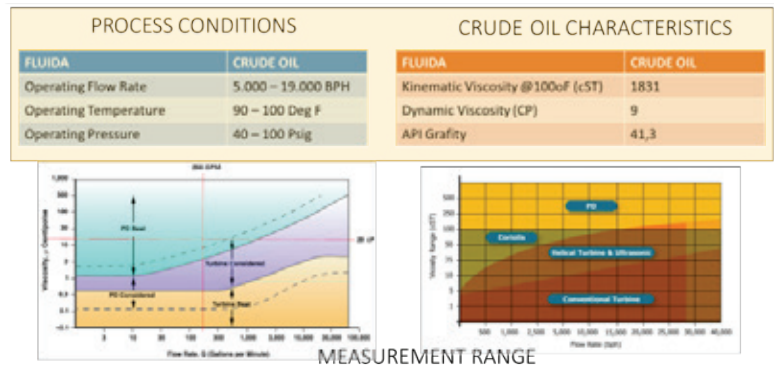
Adakalanya terjadi ketidakpadanan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya dikarenakan berbagai hal. Dengan adanya hirarki ketentuan dalam penggunaan sistem alat ukur serah terima minyak dan gas bumi diharapkan tidak terjadi benturan ketentuan sebagai acuan sehingga pelaksanaan desain, inspeksi dan pemeriksaan serta operasi dan pemeliharaan sistem alat ukur serah terima dapat dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan tercapainya nilai strategisnya.



Gambar 1. Nilai Strategis Sistem Alat Ukur Serah Terima pada Kegiatan Usaha Migas



Gambar 8. Hirarki Akurasi Penggunaan Sistem Alat Ukur Cairan



Gambar 9. Data Teknis Perencanaan Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas – Contoh : Crude Oil, Identifikasi Rentang Pengukuran

Description	Process Data		Equipment Data	Status
Flow Rate per meter run	9500 BPH	6650 GPM	Max 12500	76% max flow rate Compatible
Temperature (deg F)	90-100		Max. 200	Compatible
Pressure (PSI)	40 -100		Max. 275	Compatible
Viscosity (cP)	1.7-9		Max. 200 cP	Compatible

Normal condition, each meter run will perform at 76% (9,500/12,500 x 100% = 76%) from maximum flow rate. It is good flow rate to achieve best performance of PD meter.

Gambar 10. Data Teknis Perencanaan Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas – Contoh : Crude Oil, Analisa Kesesuaian Alat Ukur Yang Akan Digunakan

- Class 4 – Lingkungan
 - Semua jenis metering digunakan untuk sistem pengukuran lingkungan antara lain:
 - Sistem Alat Ukur Gas Suar / Pembuangan
 - Sistem Alat Ukur Emisi dan Limbah
 - Mungkin memiliki hubungan keuangan langsung seperti

perdagangan emisi, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengukuran Fiskal

- Tingkat Akurasi/Ketidakpastian:
 - Sistem Alat Ukur Meter Arus Cairan: +/- 10 - 20 % standard volume
 - Sistem Alat Ukur Meter Arus Gas: +/- 10 - 20 % standard volume

- atau sesuai persyaratan kontrak atau undang-undang yang berlaku jika lebih ketat

Sistem alat ukur berdasarkan mekanisme pengukuran secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran secara statis dan pengukuran secara dinamis. Mekanisme pengukuran manakah yang sesuai akan tergantung kepada kondisi operasi serah terima dan kebutuhan tingkat akurasinya.

Pengukuran secara statis adalah metode pengukuran suatu besaran fisika yang tidak mengalami perubahan terhadap waktu, sebagai contoh :

- sistem alat ukur tangki (pengukuran volume Minyak Bumi & BBM,
- sistem alat ukur timbangan (pengukuran massa LPG)

Sedangkan pengukuran secara dinamis adalah metode pengukuran suatu besaran fisika yang mengalami perubahan terhadap waktu, sebagai contoh:

- sistem alat ukur meter arus gas orifis (pengukuran volume gas bumi)
- sistem alat ukur meter arus cairan coriolis (pengukuran massa LPG)

Mengingat pengukuran dinamis memiliki tingkat akurasi yang lebih baik daripada pengukuran statis maka perlu ditentukan hirarki akurasi pengukuran. Hirarki akurasi pengukuran digunakan sebagai acuan untuk pengukuran serah terima migas jika terdapat discrepancy (perbedaan pengukuran) atas suatu obyek serah terima yang diperoleh dari pengukuran dua atau lebih sistem alat ukur yang berbeda. Contoh hirarki akurasi untuk sistem alat ukur cairan dapat dilihat pada Gambar 8.

Sepanjang rantai pemanfaatan dari kegiatan hulu sampai dengan hilir dan berakhir pada konsumen minyak

dan gas bumi terjadi beberapa kali serah terima sebagaimana dapat dilihat pada gambar. 4 s.d. 7. Pada tiap – tiap titik serah terima diperlukan suatu sistem alat ukur yang memadai, sehingga tujuan dari serah terima migas dapat dicapai dengan baik.

Pada perencanaan suatu sistem alat ukur migas, maka sangat perlu untuk dilakukan kajian terhadap beberapa variable sehingga sistem alat ukur dapat dioperasikan dengan memenuhi unjuk kerja fungsi yang diharapkan. Variable tersebut yaitu:

- Jenis dan sifat / properties migas
- Kapasitas proses serah terima
- Kondisi proses (tekanan, suhu)
- Jenis besaran transaksional (volume/massa/energi)
- Kelas akurasi
- Potensi bahaya
- Pola operasi serah terima (continuous atau batch/ intermittent)
- Ketentuan dalam regulasi atau kontrak / perjanjian

Setelah dilakukan perencanaan suatu sistem alat ukur serah terima maka dokumen perencanaan sistem alat ukur akan memuat dokumen teknis sekurang-kurangnya:

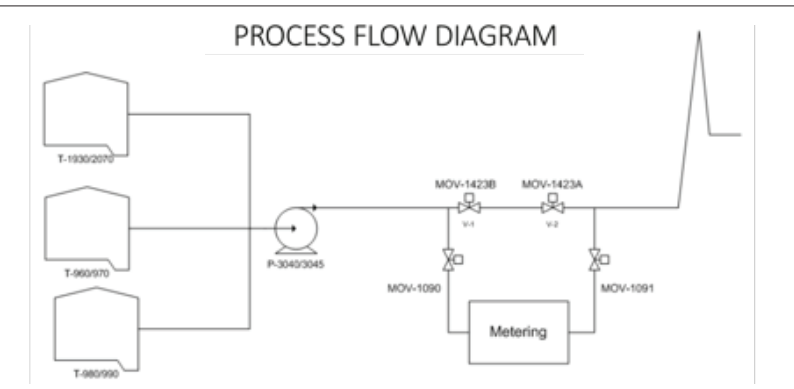
- Data Kondisi Proses;
- Design basis;
- Process flow diagram;
- Piping and instrumentation diagram;
- Sizing calculation;
- Data sheet Alat Ukur dan komponen pendukungnya;
- Izin tipe Alat Ukur yang digunakan;
- General arrangement drawing;
- Inspection test plan;
- Data lainnya yang terkait.

Dokumen – dokumen tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sistem alat ukur. Tahapan perencanaan suatu sistem alat ukur serah terima migas dapat dilihat pada gambar 9 s.d. 13.

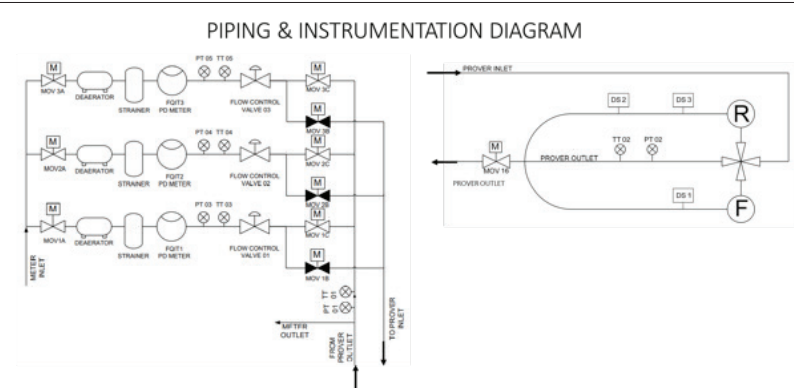
V. Kesimpulan

Sistem alat ukur serah terima memiliki nilai strategis dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi antara lain: keselamatan dan kehandalan operasi serah terima minyak dan gas bumi, akurasi

pengukuran, penetapan titik perpindahan hak/kepemilikan dan kewajiban/tanggung jawab atas pengelolaan migas, perlindungan kepentingan para pihak, penerimaan negara / fiskal, serta mendukung dan menumbuhkembangkan SDM, kemampuan rancang bangun dan pemanfaatan potensi dalam negeri. Untuk mencapai nilai strategis tersebut, diperlukan pemilihan dan desain alat ukur yang tepat sesuai dengan fluida servis dan peruntukannya sesuai dengan aturan, standar, dan spesifikasi yang ditentukan. ●



Gambar 11. Data Teknis Perencanaan Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas – Contoh : Crude Oil, Process Flow Diagram



Gambar 12. Data Teknis Perencanaan Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas – Contoh : Crude Oil, Piping & Instrumentation Diagram

Daftar Pustaka:

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Bahas Kartu Kendali LPG 3 Kg, Dirjen Migas Terima Kunjungan Gubernur Babel

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji, didampingi Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih, menerima kunjungan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kepulauan Babel) Erzaldi Rosman Djohan di Ruang Wijarso, Gedung Ibnu Sutowo, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/01/2021). Salah satu materi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemberlakuan Kartu Kendali LPG 3 kg.

Pemerintah Kepulauan Babel berencana memberlakukan Kartu Kendali LPG 3 kg. Rencana pemberlakuan Kartu Kendali LPG 3 kg agar tepat sasaran. Terkait data masyarakat miskin, Bappeda bekerja sama dengan BPS. Berdasarkan data tersebut, nantinya masyarakat miskin

akan diberikan kartu untuk membeli LPG 3 kg sesuai dengan jatah dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Penggunaan kartu kendali untuk barang subsidi bukan hal baru bagi Pemerintah Kepulauan Babel. Sejak dua tahun silam, Pemerintah Kepulauan Babel telah menggunakan Kartu Kendali BBM untuk mengendalikan kuota Solar bersubsidi.

Tutuka Ariadji menyambut baik rencana pemberlakuan Kartu Kendali LPG 3 kg agar tepat sasaran. Dia berpesan agar pelaksanaannya memperhatikan kriteria masyarakat yang berhak menerimanya.

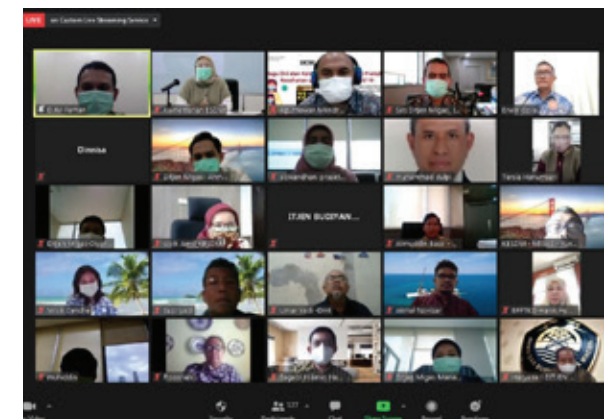
“Yang penting kriterianya, siapa saja yang berhak menerimanya agar tepat

sasaran, asas keadilan, asas manfaat. LPG 3 kg ini banyak yang tidak tepat sasaran karena juga dipakai juga untuk rumah makan besar dan lain-lain,” ujar Tutuka.

Selain Kartu Kendali LPG 3 kg, pertemuan ini juga membicarakan peningkatan kebutuhan LPG 3 kg dan pembagian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan, serta rencana penghapusan bensin RON 88.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Migas juga mendukung rencana daerah tersebut untuk menghapus bensin RON 88. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik. ●

Kembali, Ditjen Migas Gelar Bincang Kesehatan



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar acara Sharing Session Bincang Kesehatan terkait Covid-19, Jumat (22/01/2021). Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini merupakan upaya mengedukasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 kepada para pegawai Ditjen Migas dan keluarga besar sektor ESDM.

Sharing Session Bincang Kesehatan kali ini menghadirkan narasumber Dr. Andika Chandra Putra, Ph.D, Sp.P(K) dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Tema acara ini adalah “Jaga Diri dan Keluarga dengan Patuhi Protokol Kesehatan Guna Mencegah Covid-19”. Dalam sesi kedua, diskusi diisi oleh para penyintas Covid-19 di lingkungan Ditjen Migas.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas dan Kementerian ESDM serta sejumlah pegawai. Saat membuka acara ini, Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan, “Untuk Ditjen Migas, sebagian besar yang terpapar merupakan klaster keluarga. Diskusi

ini sangat penting untuk menekan penyebaran Covid-19, tak hanya di kantor tapi juga di rumah. Kita perlu paham harus menerapkan protokol kesehatan seperti apa agar terhindar dari penyakit ini”.

Mengakhiri sambutannya, Sesditjen Migas kembali mengingatkan para pegawai agar tetap menjaga kesehatan dengan 5M, yaitu Memakai Masker, Mencuci tangan dengan Sabun, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumahan, dan Membatasi Mobilitas.

Dalam kesempatan ini, Dr. Andika Chandra Putra memaparkan, diagnosis Covid-19 dapat dilakukan melalui anamnesis atau berdasarkan keluhan, riwayat kontak, dan tracing. Selain itu, pemeriksaan fisis (suhu tubuh, frekuensi napas), pemeriksaan laboratorium, radiologi (CT scan toraks), dan deteksi virus.

Lebih lanjut Andika memaparkan, apabila kita memiliki gejala Covid-19, maka hal utama yang harus dilakukan adalah tetap waspada dan jangan panik. Setelah itu, segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila

hasil pemeriksaan menunjukkan terpapar Covid-19, maka pasien harus melakukan isolasi sampai dinyatakan baik oleh dokter dan melakukan pemantauan diri, termasuk mengukur suhu dua kali sehari.

Untuk pasien tanpa gejala, dapat melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas kesehatan dan melakukan kontrol setelah 14 hari untuk pemantauan klinis.

“Sepanjang imunitas kita baik, tidak stres, makan dan minum yang bergizi, mudah-mudahan sembuh. Pasien tanpa gejala tidak memerlukan obat anti virus,” tegasnya.

Kesimpulannya, untuk mencegah tertular penyakit ini, dapat dilakukan dengan menggunakan masker bila keluar rumah, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, sering mencuci tangan dan tidak menyentuh wilayah wajah, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, aktivitas fisik rutin, dan mengonsumsi suplemen tambahan atau vitamin bila diperlukan. ●





Refocusing Anggaran Rp1,1 Triliun Tak Pangkas Pembangunan Infrastruktur untuk Masyarakat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021. Besaran refocusing tersebut adalah Rp1,1 triliun, dari anggaran awal Rp7 triliun menjadi Rp5,9 triliun. Namun, refocusing ini tidak mengurangi volume infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat, seperti pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas), pembagian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani serta pembangunan PJU-TS.

“Refocusing dan realokasi anggaran ini sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Nomor S-30/MK.02/3021 tanggal 12 Januari 2021,” jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (19/01/2021).

Refocusing bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, program vaksin nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial, dan percepatan ekonomi nasional. Sumber penghematan berasal dari rupiah murni dan belanja barang non operasional dan belanja modal non operasional.

Kriteria atau fokus penghematan belanja, yaitu honorarium dan belanja jasa, perjalanan dinas/ paket meeting, bantuan kepada masyarakat/pemda bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan atau peralatan/mesin, sisa lelang dan anggaran belum dikontrakan atau tidak mungkin dilaksanakan serta kegiatan tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.. ●



Inilah Capaian Subsektor Migas Tahun 2020 dan Target Tahun 2021

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menghadiri jumpa pers secara daring terkait capaian subsektor migas 2020 dan target 2021 di Gedung Ibnu Sutowo, Senin (18/01/2021).

Capaian subsektor migas di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan wilayah kerja (WK) Migas dilakukan dalam rangka penawaran WK Migas di mana pada tahun 2020 telah dihasilkan lima persetujuan studi bersama dan satu izin survei umum.
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) bekerja sama dengan SKK Migas memberikan alokasi untuk pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang sesuai status Oktober 2020, mencapai 63,16%.
3. Lifting migas mencapai 707 MBOPD untuk minyak dan gas bumi serta 975 MBOEPD untuk gas bumi dengan ICP rata-rata pada nilai US\$40,39 per barel.
4. Penerimaan negara PNB SDA mencapai Rp69,71 triliun, PNB Fungsional sebesar Rp53,85 miliar,

dan PPh Migas sebesar Rp29,16 triliun.

5. Investasi migas mencapai US\$12,09 miliar.
6. Implementasi penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan yang diharapkan dapat memberikan multiplier effects yang lebih baik untuk tumbuhnya perekonomian nasional.
7. Pembangunan jargas mencapai 135.286 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 23 kabupaten/ kota, pendistribusian Konkrit Nelayan sejumlah 25.000 paket yang tersebar di 42 kabupaten/ kota, dan pembagian Konkrit Petani sebanyak 10.000 paket yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
8. Program penyaluran B30 mencapai 95,45% dengan potensi saving sebesar US\$2,53 miliar.
9. Penerbitan perizinan meliputi 24 izin usaha pengolahan, 52 izin usaha penyimpanan, 784 izin usaha pengangkutan, dan 134 izin usaha niaga.
10. Realisasi anggaran hingga 97% dari pagu Rp2,01 triliun.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan delapan target besar untuk tahun 2021. Kedelapan target itu adalah sebagai berikut:

1. Penawaran 10 WK migas secara bertahap.
2. Pemanfaatan gas domestik mencapai 65% yang akan diserap oleh industri dan kelistrikan.
3. Lifting migas sebesar 705 MBOPD dan lifting gas bumi sebesar 1007 MBOPD. Jadi, total lifting migas sebesar 1.712 MBOPD dan ICP sebesar US\$45 per barel.
4. Investasi migas sebesar US\$17,59 miliar dengan kontribusi dari hulu sebesar US\$12,38 miliar dan hilir sebesar US\$5,2 miliar
5. Kebijakan implementasi penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan.
6. Alokasi FAME sebesar 9,2 juta KL dengan potential saving dari subsidi Solar menggunakan FAME dapat mencapai US\$76 miliar.
7. Pembangunan jargas dan pembagian konverter kit untuk nelayan dan petani yang menyerap hampir 87,8% anggaran untuk belanja publik.
8. Menyelesaikan isu-isu nasional dengan beberapa strategi, seperti isu meningkatkan investasi, pemulihan kondisi, atau pandemic recovery. ●

Pemerintah Tetap Kejar Target Lifting Minyak 1 Juta Barel

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mendampingi Komisi VII DPR dalam Kunjungan Kerja ke Pertamina EP Asset 3 Subang Field, Kamis (28/01/2021). Dalam kunjungan tersebut, Tutuka menegaskan bahwa Pemerintah tetap serius untuk mencapai target lifting minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030.

"Pemerintah sangat serius tentang target tahun 2030 di mana produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar standar kaki kubik. Kita bekerja dari hari ke hari, minggu ke minggu

untuk bisa mendetilkkan program ini," paparnya.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Tutuka, Pemerintah telah memilih sejumlah lapangan yang akan ditingkatkan produksinya dan teknologi yang paling tepat untuk digunakan.

"Kita bergerak dari satu strategi ke strategi lainnya. Kami sadar betul perlu banyak strategi untuk mencapai target lifting migas ini," tambahnya.

Strategi yang digunakan antara lain mempertahankan produksi saat ini

agar penurunannya tidak drastis. Ini tidak mudah karena sebagian besar lapangan migas di Indonesia merupakan lapangan tua.

"Produksi minyak kita 705.000 barel per hari di mana pada saat ini 80% berasal dari lapangan tua dan itu sangat tidak mudah (mengelolanya). Kami sangat mengapresiasi KKKS, termasuk Pertamina, yang berupaya keras untuk mempertahankan produksi," ujar Tutuka.

Sementara itu, untuk kondisi cadangan dan potensi gas Indonesia, dapat dikatakan lebih baik dibandingkan minyak. Beberapa proyek gas yang masih terkendala saat ini, diharapkan dapat segera diselesaikan dan bisa berproduksi sesuai target, misalnya Blok Masela dan IDD.

Di luar proyek-proyek tersebut, ujar Dirjen Migas, Indonesia masih memiliki cadangan gas yang besar sejak 40 tahun lalu dan hingga saat ini belum dikomersialkan yaitu Blok East Natuna. Apabila dapat diproduksi, diperkirakan dapat menambah lifting sebanyak 3 miliar standar kaki kubik selama 25 tahun.

Namun Tutuka menyadari, untuk memproduksi gas dari blok tersebut tidak mudah karena kandungan CO₂-nya sangat tinggi dan bahkan dapat dikatakan satu-satunya di dunia. Apabila potensi tersebut mampu dimanfaatkan, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang tinggi. Oleh sebab itu, Dirjen Migas meyakini, target lifting migas tersebut dapat tercapai apabila ada kerja kerja keras dan kerja sama dengan semua pihak. ●



Ditjen Migas Salurkan Bantuan untuk Pegawai Korban Banjir



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyalurkan bantuan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Alih Daya (TAD) di lingkungan Ditjen Migas yang terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyerahkan bantuan berupa sembako dan medical kit secara simbolis di Ruang Strategis Lantai 16 Gedung Ibnu Sutowo Ditjen Migas, Senin (22/02/2021).

Dalam sambutannya, Dirjen Migas Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa

bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan empati dari seluruh Keluarga Besar Kementerian ESDM, khususnya Ditjen Migas.

"Kepada pegawai dan keluarganya yang saat ini mengalami musibah banjir, saya mewakili Keluarga Besar Ditjen Migas mengharapkan agar semua tetap dalam keadaan sehat walaupun sulit. Harapan kami tetap sabar dalam menghadapi musibah ini," katanya.

Adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pegawai

dan keluarganya yang terkena musibah.

"Mohon diterima paket bantuan untuk meringankan apa yang dialami saat ini. Kami berdoa semoga para korban dapat segera mengatasi kesulitan masing-masing dan menjalankan aktivitas seperti biasa," tutupnya.

Sebanyak 24 paket bantuan sembako dan medical kit tersebut selanjutnya akan disampaikan ke kediaman korban yang berada di sekitar wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. ●

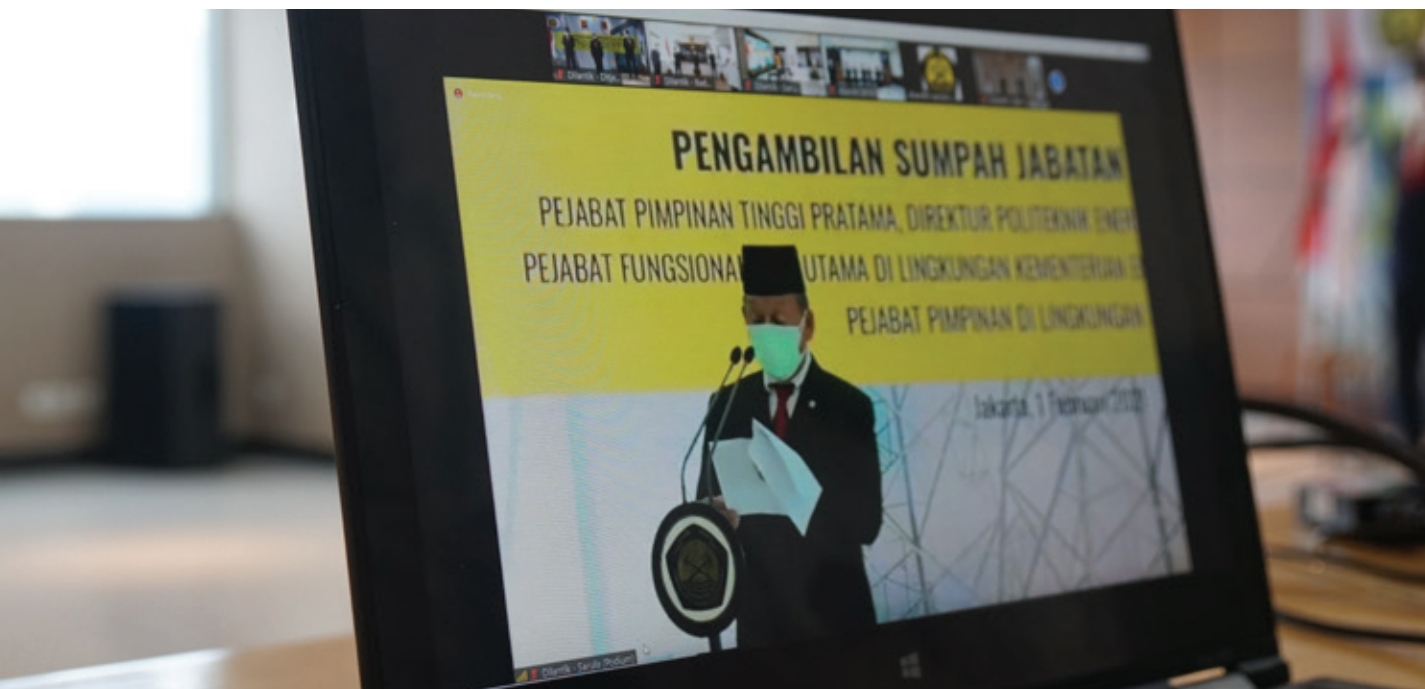


Menteri ESDM Lantik Empat Pejabat Eselon II Ditjen Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik dan mengambil sumpah empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Senin (01/02/2021). Keempat pejabat tersebut menjadi bagian dari 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian ESDM yang dilantik pada hari yang sama.

Empat pejabat di lingkungan Ditjen Migas yang dilantik tersebut adalah:

1. Alimuddin Baso, S.T., M.A.B. sebagai Sekretaris Ditjen Migas, menggantikan Iwan Prasetya Adhi, S.E. yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
2. Soerjaningsih, M.K.K.K. sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. Soerjaningsih sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Migas pada Direktorat Jenderal Migas.
3. Noor Arifin Muhammad, S.T., M.SIE. sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Jabatan sebelumnya adalah Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.



4. Wakhid Hasyim, M.T sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya Wakhid menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada pelantikan yang dilaksanakan di unit masing-masing secara tatap

muka dan virtual tersebut, Menteri ESDM menyampaikan, rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini dilatarbelakangi oleh sejumlah hal. Hal-hal yang dimaksud adalah penataan karena adanya jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang lowong, penyegaran karena JPT sudah menduduki jabatan selama dua tahun atau lebih, dan peningkatan kinerja organisasi serta percepatan program-program strategis Kementerian ESDM.

Secara keseluruhan, ke-31 pejabat yang dilantik terdiri dari 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengalami rotasi, 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil Seleksi Terbuka, 1 Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, 1 Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Utama, dan 3 Pimpinan SKK Migas. ●

Pemerintah Dorong Tumbuhnya Industri Agar Bisa Serap Gas Lapangan Sinamar



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mendampingi Komisi VII DPR dalam kunjungan kerja ke Lapangan Sinamar, Blok South West Bukit Barisan, Kamis (11/02/2021). Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah mendorong tumbuhnya industri di Sumatera Barat agar menyerap gas dari Lapangan Sinamar, Blok South West Bukit Barisan yang terletak di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dengan pertumbuhan industri yang pesat tersebut, diharapkan produksi gas dari lapangan tersebut dapat dipercepat.

Tutuka mengungkapkan, masih terbatasnya pembeli untuk Lapangan Sinamar, menjadikan lapangan ini belum dapat diproduksi. Padahal, lapangan tersebut cadangannya

termasuk menengah, yaitu sebesar 245 BSCF (billion standard cubic feet) dengan potensi produksi sebesar 35 MMSCFD (million standard cubic feet per day) dan 800 barel kondensat per hari.

Rencananya gas dari Lapangan Sinamar yang dikelola PT Rizki Bukit Barisan (RBB) tersebut, akan mulai diproduksi pada kuartal keempat tahun 2023 sebesar 2 MMSCFD. Gas yang akan diproduksi akan digunakan untuk pembangkit listrik ke PLN dengan kapasitas 10 megawatt.

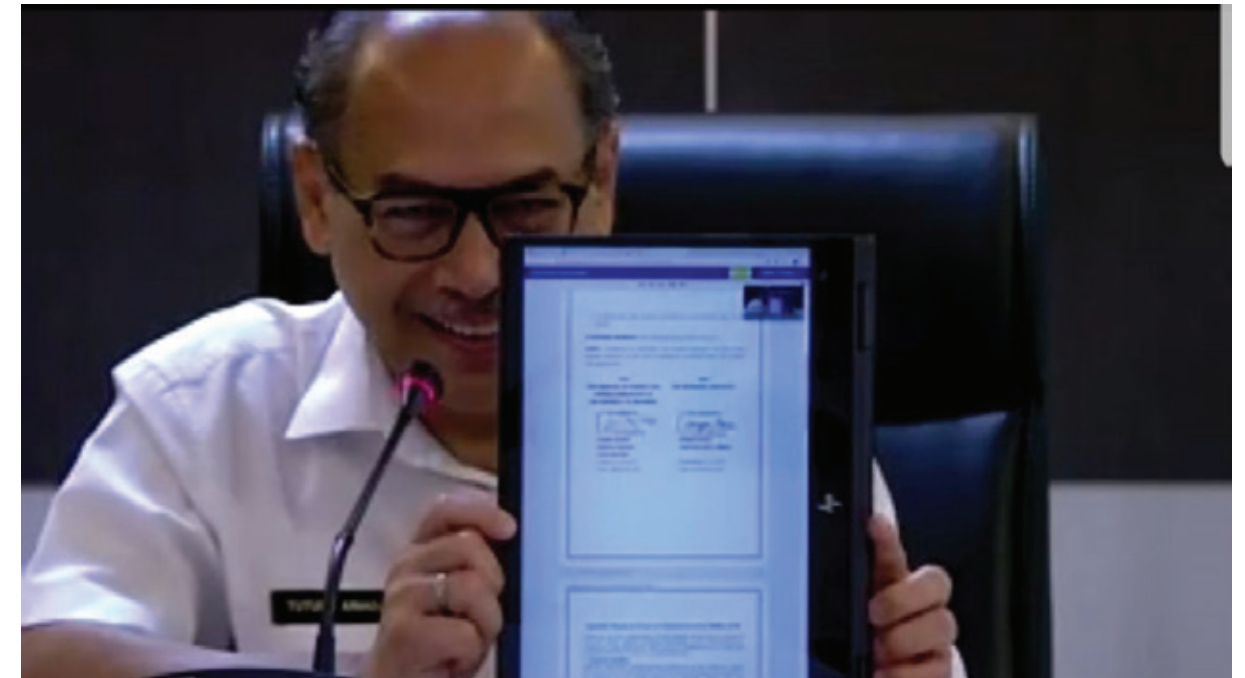
Tutuka melanjutkan, berbeda dengan minyak bumi, gas baru dapat diproduksi apabila konsumennya telah tersedia.

“Potensi gas yang besar itu tidak akan dikeluarkan dari bawah tanah kecuali

kalau ada pembeli. Menyimpan gas itu sangat susah. Jadi yang paling murah simpan aja di bawah tanah. Dengan demikian, produksi gas tergantung pihak-pihak di sini bagaimana mengembangkan gas tersebut,” kata Dirjen Migas.

Pertumbuhan industri di Sumatera Barat, lanjutnya, akan menyerap gas yang banyak. Industri juga akan membutuhkan listrik yang pembangkitnya berbahan bakar gas.

Kegiatan eksplorasi migas di Lapangan Sinamar telah berlangsung lama sejak PT Caltex mulai beroperasi di wilayah kerja blok Singkarak pada 1981. Kemudian PT RBB mengambil alih kegiatan eksplorasi wilayah tersebut sejak 2018. ●



Kementerian ESDM-The Methanol Institute Bersinergi Kembangkan Metanol

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji, mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat menandatangani Letter of Intent (LoI) antara Kementerian ESDM dan The Methanol Institute. Acara yang digelar secara virtual pada Selasa (30/03/2021) ini merupakan langkah konkret dalam pengembangan energi bersih, khususnya methanol, di Indonesia.

Dalam penandatanganan LoI tersebut, Kementerian ESDM dan The Methanol Institute sepakat untuk bertukar informasi mengenai industri metanol, termasuk perkembangan teknologi dan pemanfaatannya sebagai produk energi dan melakukan penelitian bersama berbasis karya tulis ilmiah mengenai metanol sebagai produk energi di Indonesia.

Selain itu, mengembangkan kemampuan teknis para pemangku kepentingan yang berasal dari Indonesia, termasuk pejabat pemerintah dan pihak swasta, serta mengadakan seminar, lokakarya,

konferensi dan mengembangkan kegiatan kerja sama terkait lainnya yang disepakati keduanya.

Singkatnya, berdasarkan LoI tersebut, kerja sama antara Pemerintah RI dan The Methanol Institute dibagi dalam empat area, yaitu peningkatan kapasitas, rekomendasi kebijakan, kajian awal mengenai potensi metanol, dan forum metanol di Indonesia.

Mengawali sambutannya, Tutuka Ariadji mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 masih belum

tuntas, tidak menghambat kedua pihak untuk memulai kerja sama. Atas teknologi informasi yang telah maju saat ini, hambatan lokasi dan perbedaan waktu, dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

CEO The Methanol Institute Gregory Dolan yang mengawakili institusinya dalam penandatanganan LoI ini menyambut gembira kerja sama antara pihaknya dan Pemerintah RI karena merupakan peluang yang bagus dalam pengembangan metanol sebagai salah satu energi bersih. ●



Kementerian ESDM Gandeng TNI AL Tingkatkan Pengawasan Migas Lepas Pantai



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji, mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menandatangani kerja sama Perbantuan Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dalam Penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Selasa (30/03/2021), di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta. Kerja sama ini terkait kegiatan pengawasan migas di lepas pantai melalui Staf Khusus Urusan Maritim Minyak dan Gas Bumi (Susmar Migas).

Dalam kesempatan tersebut, TNI AL diwakili oleh Asisten Personel (Aspers) Kasal Laksda TNI Irwan Achmadi. Kerja sama Kementerian ESDM dan TNI AL dalam kegiatan pengawasan migas di lepas pantai ini, sejatinya telah terjalin sejak 1967. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Panglima Angkatan

Laut dengan Dirjen Migas nomor 5401.40 dan nornor 371 /DD/MIGAS/1967 tanggal 4 Juli 1967. Namun mengingat payung hukum Susmar Migas tersebut sudah terlalu lama, perlu dilakukan penyesuaian kondisi saat ini.

“Alhamdulillah, pada hari ini Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Energi c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan TNI Angkatan Laut direvisi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna ditanda tangani antara kedua belah pihak,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekjen ESDM Ego Syahrial secara virtual.

Menurut Menteri ESDM, Susmar Migas berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan migas di lepas pantai dan turut serta membantu pengamanan objek vital

nasional dari aspek kemaritiman. Saat ini Pemerintah berkomitmen untuk mengejar target produksi 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

Perjanjian kerja sama harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan soliditas yang lebih erat lagi antara Kementerian ESDM dan TNI AL.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Personel (Aspers) Laksda TNI Irwan Achmadi mengungkapkan, perbantuan personel TNI AL dalam kegiatan migas yang telah dilakukan sejak 1967, merupakan wujud sinergitas kedua instansi ini dalam pembangunan bangsa. ●

Hibah SPBG CNG, Ditjen Migas-NEDO Pererat Kerja Sama

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji turut menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) hibah berupa SPBG CNG di Karawang. Penandatanganan BAST yang berlangsung di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Senin (29/03/2021), ini merupakan kerja sama antara Ditjen Migas dan NEDO.

Penandatanganan ini juga mengakhiri kerja sama Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure Including Support of Development of Sustainable Environment, dan sekaligus dilakukan penyerahan Policy Recommendations: Institutional Design for Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure in Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Migas dan NEDO juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas

pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sejak MoU ditandatangani pada 11 Desember 2017 hingga berakhirnya kerja sama ini pada bulan Maret 2021, termasuk pada Pertamina selaku Migas Entrusted Party, dan juga NEDO Entrusted Parties (Toyota Motor Corporation, Toyota Tshusho Corporation, Hino Motors Ltd., Toho Gas Engineering Co. Ltd, dan Japan Automobile Research Institute).

Executive Direktor NEDO Mr. Kobayashi Izuru dalam kesempatan itu menyatakan kegembiraannya dapat bekerja sama dengan Indonesia, sekaligus memperluas penggunaan CNG.

“Saya sangat senang karena kita dapat menyelesaikan proyek kendaraan CNG, infrastruktur, serta dukungan lainnya yang bertujuan memperluas pemanfaatan CNG di Indonesia,” katanya.

Senada dengan Kobayashi, Tutuka Ariadji mengapresiasi kerja sama ini dan mengharapkan agar di masa depan dapat lebih ditingkatkan lagi. Lebih lanjut Tutuka mengungkapkan, Indonesia mendukung pemanfaatan energi bersih yang merupakan energi transisi menuju energi terbarukan.

“Dengan kerja sama ini akan mempercepat dan mendukung terwujudnya energi bersih, dalam hal ini pd sektor transportasi. Kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakuka NEDO,” tambahnya.

Indonesia dan NEDO telah menjalin kerja sama yang cukup lama, melalui berbagai proyek. Dalam pelaksanaannya, sejumlah tantangan juga dihadapi seperti pandemi Covid-19 dan banjir yang sempat merusak peralatan di gudang. ●



25 Maret 2021



Dirjen Migas Tinjau Pembangunan PLTGU Jawa Satu



memberikan efisiensi termal tinggi hingga 65% dan harga jual listrik yang kompetitif. Proyek ini dinilai sangat tepat sebagai energi transisi di Indonesia karena di masa depan, gas menjadi tulang punggung energi nasional.

“PLTGU ini sangat tepat untuk energi transisi di Indonesia. Gasnya bisa dipakai untuk memanaskan uap. Ini berteknologi tinggi sehingga efisiensinya mencapai 65%. Biasanya rata-rata efisiensinya di bawah 50%. Hal tersebut menjadikan produk dari fasilitas ini lebih efisien. Dengan input yang sama, hasil yang diperoleh lebih efisien sehingga harga jual listriknya menjadi murah. Ini penting sekali,” ujar Tutuka.

Proyek strategis dan prioritas nasional ini juga menghubungkan ketersediaan pasokan gas di Indonesia bagian timur (Papua) dengan kebutuhan listrik di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Pasokan LNG dari kilang LNG BP Tangguh akan diregasifikasi di Kapal FSRU Jawa Satu yang saat ini sudah bersandar di lepas pantai Cilamaya dan akan berada di sana selama 25 tahun. ●

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mendampingi Komisi VII DPR dalam kunjungan kerja spesifik ke proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa Satu di Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, Kamis (25/03/2021). Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa pembangunan PLTGU Jawa Satu memasuki tahap akhir.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, berdasarkan data terkini, pihaknya optimis dapat

memenuhi target Commercial Operation Date (COD) pada Desember 2021.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno yang juga sebagai Ketua Tim Kunker menyatakan, kunjungan ini tidak hanya memastikan aktivitas konstruksi pembangunan pembangkit berjalan lancar, tetapi juga untuk mendapatkan informasi-informasi detail terkait proyek PLTGU yang terintegrasi dengan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) ini.

PLTGU Jawa Satu menggunakan generasi terbaru single shaft combined cycle gas turbine yang

Tahun 2029, Operator Tangguh LNG Mayoritas Asal Papua

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji turut menghadiri Wisuda Program Operation and Maintenance Papuan Technician Apprentice secara daring, Selasa (16/03/2021). Para lulusan diharapkan menjadi bagian dari pengoperasian Tangguh LNG ke depannya. Pada tahun 2029 nanti, sebanyak 85% tenaga kerja operator di Tangguh LNG berasal dari Papua.

Gelaran Wisuda Program Operation and Maintenance Papuan Technician Apprentice ini juga turut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Dalam kesempatan ini, Menteri ESDM mengapresiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau atas dedikasi yang diberikan dalam melaksanakan program magang, khususnya kepada anak-anak negeri yang berasal dari Papua Barat. Program ini merupakan bagian dari komitmen bahwa 85% tenaga kerja operator di Tangguh LNG berasal dari Papua pada tahun 2029 mendatang.

“Diharapkan, para lulusan berhasil menjadi bagian dari pengoperasian

Tangguh LNG sehingga akan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat yang berada di sekitar operasi Tangguh LNG pada khususnya dan masyarakat Papua Barat pada umumnya,” kata Menteri Arifin.

Dengan semakin banyaknya anak-anak negeri yang berkiprah dalam industri migas, Menteri berharap dapat berdampak nyata pada perbaikan kinerja industri migas setempat. Sejak program magang ini dimulai tahun 2016, hingga saat ini sebanyak 71 peserta telah menyelesaikan program magang tersebut, di mana 68 orang di antaranya telah bekerja di Tangguh LNG.

Wisudawan pada periode ketiga ini telah melewati masa pelatihan selama tiga tahun. Ilmu dan keterampilan yang dipelajari tidak hanya bermanfaat dalam mengoperasikan kilang LNG Tangguh, tetapi juga berbagai

kilang di Indonesia maupun luar negeri.

“Melalui program magang selama tiga tahun, saya berharap para peserta mampu memenuhi standar tinggi yang diperlukan dari seorang tenaga profesional di industri migas,” tambahnya.

Menteri ESDM juga meminta agar wisudawan tidak lantas berpuas diri. Sebaliknya harus terus meningkatkan kemampuan diri masing-masing sehingga kelak tidak hanya sekadar menjadi tenaga operator akan tetapi juga menjadi salah satu jajaran pimpinan atau bahkan menjadi ahli di berbagai perusahaan migas di dalam maupun luar negeri. ●



Lebih dari 5 Ribu Pegawai Kementerian ESDM Berpartisipasi dalam Vaksinasi Covid-19



Kementerian Energi Dan sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan vaksinasi massal keluarga besar Kementerian ESDM pertengahan Maret lalu. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program vaksinasi nasional dan membentuk herd immunity.

"Kementerian ESDM, didukung Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan rumah sakit di sekitar kantor Kementerian ESDM menyelenggarakan vaksinasi massal untuk sekitar 5.500 pegawai di Kementerian ESDM yang wilayah

kerjanya di DKI Jakarta," ungkap Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian ESDM Upik Jamil.

Tujuan untuk pelaksanaan vaksinasi, dijelaskan Upik adalah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan massal dari seluruh pegawai Kementerian ESDM.

Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan selama lima hari (12–16 Maret 2021) ini diikuti sekitar 5.198 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) serta

tenaga outsourcing. Hari pertama kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh para Pimpinan Tinggi, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli, Anggota Komite BPH, APK DEN dan dilanjutkan dengan pegawai.

Dengan melibatkan sekitar 120 tenaga kesehatan, termasuk tim kesehatan Kementerian ESDM, pelaksanaan vaksinasi ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan beberapa rumah sakit rujukan, yaitu RS Abdi Waluyo, RS PGI Cikini, RSUD Tarakan, dan RS Johar. ●



Alih Kelola Blok Rokan Dipastikan Berjalan Lancar

Proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero) dipastikan berjalan lancar. Pada 9 Agustus 2021 mendatang, pengelolaan Blok Rokan akan beralih ke Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Demikian benang merah pertemuan Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR dengan Pemerintah yang diwakili Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, SKK Migas yang diwakili Deputi Perencanaan Jaffe Suardin, Gubernur Riau Syamsuar, DPRD Riau, Polda Riau, lembaga adat dan tokoh masyarakat Riau, PT Pertamina dan PT CPI di Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Selasa (09/03/2021). Usai pertemuan, dilakukan kunjungan ke Lapangan Minas.

"Insya Allah, pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini," ujar Wakil Ketua

Komisi VII DPR Alex Noerdin yang memimpin Panja tersebut.

Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat. Alex juga meminta agar Pemda Riau dilibatkan dalam Tim Alih Kelola Blok Rokan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengungkapkan, Pemerintah mendukung proses alih kelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah juga mengharapkan agar produksi Blok Rokan dapat terjaga, bahkan ditingkatkan. Saat ini telah dilakukan identifikasi potensi-potensi lain di Blok Rokan yang belum dikembangkan PT CPI dan menjadi harapan peningkatan produksi migas di masa depan.

Progress alih kelola Blok Rokan saat ini yang terkait migrasi data teknis

dan operasional telah mencapai 80%. Sementara itu, untuk chemical EOR telah mencapai 50%, di mana CPI dan PHR terus bekerja sama dalam percepatan data transfer, model conversion, me-resolve issue surfactant, dan reinstatement SFT-2 facility.

Untuk manajemen kontrak, progress-nya mencapai 60% di mana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring. Pengadaan rig dan material 115 sumur mencapai 100%, sedangkan 77 sumur mencapai 10%. Terkait ketenagakerjaan, telah rampung 70% di mana telah tercapai kesepakatan transfer karyawan antara PT CPI dan PHR.

Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 kilometer persegi yang terletak di lima kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. ●





Dirjen Migas Hadiri Pengukuhan Pengurus ADPM

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) 2020-2025, Selasa (02/03/2021). Pengukuhan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan digelar secara tatap muka dan virtual ini, dihadiri pula oleh para gubernur, bupati dan walikota Anggota ADPM.

Dalam sambutannya, Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengharapkan agar APDM dapat terus memberikan kontribusi untuk kemajuan subsektor migas di Indonesia. Sinergi yang selama ini telah terjalin, diharapkan dapat ditingkatkan demi kemajuan industri migas nasional.

Lebih lanjut Tutuka mengatakan, kebijakan energi nasional saat ini telah beralih dari semula energi sebagai komoditas semata, menjadi energi sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan energi untuk ekspor secara bertahap telah dikurangi, sebaliknya pemanfaatan untuk domestik terus meningkat, utamanya gas bumi dan batubara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus ADPM Ridwan Kamil mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ADPM. Selain menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari sisi migas, tapi ADPM juga ingin menjadi daerah yang mempersiapkan dan merespons masa depan terkait energi terbarukan.

ADPM juga berusaha menciptakan iklim migas yang lebih berkeadilan

terutama bagi daerah-daerah kaya cadangan energi. Daerah penghasil harus mendapatkan haknya untuk dapat menyejahterakan rakyatnya. Misi lain yang hendak dicapai ADPM adalah pengembangan SDM agar daerah tidak jadi objek atau penonton di tengah kekayaan sumber energi yang dimiliki. ●



Dirjen Migas Lantik Puluhan ASN Ditjen Migas



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji melantik dan mengambil sumpah 28 Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (05/04/2021). Dua puluh delapan ASN tersebut telah dinyatakan lulus uji kompetensi dengan jalur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina, serta kenaikan jenjang jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas sebanyak tujuh orang.

Pada acara yang dilakukan secara tatap muka dan virtual ini, Dirjen Migas juga menyerahkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Kenaikan Pangkat Periode April 2021 kepada 40 orang yang diwakili secara simbolis kepada 3 pegawai.

“Pelaksanaan inpassing bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi, serta memberikan jenjang karier, di mana pasca transformasi jabatan, organisasi menjadi minim struktur, namun kaya akan fungsi,”

kata Dirjen Migas mengawali sambutannya.

Adapun Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja pegawai, di samping telah dipenuhinya syarat masa kerja golongan dalam pangkat terakhir, serta terpenuhinya sasaran kerja pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

ASN memiliki fungsi dan peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, yang bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dibutuhkan aparatur yang kompeten dan profesional. “Saya percaya, saudara memiliki kompetensi dan kualitas. Oleh karenanya, saya yakin dan percaya, saudara akan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan optimal,” tegas Dirjen Migas.

Tak lupa, Dirjen Migas juga mengajak para pegawai dapat memberikan kontribusi dan sumbangsihnya bagi keberhasilan dan kemajuan Ditjen Migas. Prestasi yang telah dicapai, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. ●

Dampingi Menteri ESDM, Dirjen Migas Kunjungi Proyek Banyu Urip

Dirjen Migas Tutuka Ariadji turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat mengunjungi Proyek Banyu Urip, Blok Cepu, Kamis (22/04/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM mengapresiasi peningkatan kapasitas produksi di lapangan Banyu Urip dengan fasilitas yang ada dan menyumbang 30% produksi minyak nasional.

Dengan produksi sebesar itu, maka Blok Cepu menempatkan diri menjadi produsen minyak nasional terbesar di Indonesia. Blok Cepu akan menyumbangkan pendapatan kepada negara sekitar US\$45 Miliar di harga minyak sekitar US\$70/barel selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

“Capaian produksi minyak Lapangan Banyu Urip merupakan prestasi yang membanggakan yang bisa meningkatkan kapasitas produksi hingga 20% dengan fasilitas yang ada dan bisa dilakukan dengan aman,” ujar Menteri Arifin.

Produksi awal lapangan Banyu Urip dimulai pada Desember 2008 melalui fasilitas produksi awal yang mulai berproduksi dengan kapasitas 20 mbopd pada Agustus 2009. Melalui inovasi dan keunggulan dari manajemen proyek, produksi meningkat menjadi lebih dari 80 mbopd pada saat dimulainya start-up di tahun 2015. Pada produksi puncaknya, Banyu Urip memproduksi sebanyak 165 mbopd dan terus berkembang hingga mencapai 235 mbopd dengan tetap mempertahankan operasi yang aman dan andal sehingga menempatkannya menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia.

Biaya pengembangan Blok Cepu terbilang murah, yaitu US\$4,5/barel jika dibandingkan rata-rata industri sebesar US\$15/barel. Biaya produksi di sekitar US\$2,9/barel pada tahun 2019 dan sekitar US\$1,9/barel pada tahun 2020, termasuk salah satu biaya terendah di Indonesia.

Fasilitas lapangan Banyu Urip saat ini meliputi tiga wellpad dengan 29 sumur produksi dan 16 sumur injeksi serta satu sumur produksi di lapangan Kedung Keris terhubung ke wellpad.

Lapangan Minyak Banyu Urip merupakan pengembangan pertama di dalam wilayah kerja Blok Cepu dan mencakup pengembangan lapangan minyak Banyu Urip, dengan penemuan cadangan minyak mentah yang diperkirakan sebanyak 450 juta barel yang diumumkan pada April 2001.

Kontrak Kerja Sama (KKS) Cepu sendiri ditandatangani pada 17 September 2005, mencakup wilayah kontrak Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Ampolex Cepu Pte Ltd., PT Pertamina EP Cepu dan empat Badan Usaha Milik Daerah (PT Sarana Patra Hulu Cepu, PT Asri Dharma Sejahtera, PT Blora Patragas Hulu, dan PT Petrogas Jatim Utama Cendana) yang tergabung menjadi kontraktor di bawah KKS Cepu.



Terkendala Pandemi Covid-19, Pemerintah Tetap Dorong Proyek JTB Onstream Tahun Ini

Pembangunan Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) mengalami kendala akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, Pemerintah tetap mendorong salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini tetap *onstream* di tahun ini.

Awalnya, Proyek JTB dijadwalkan *onstream* pada triwulan 3 tahun 2021. Namun pembangunan Proyek JTB mengalami keterlambatan akibat pandemi Covid-19.

“JTB itu karena Covid ada keterlambatan. Kita sudah minta manajemen mengejar kembali sehingga proyek ini dapat menghasilkan gas di akhir tahun,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif usai kunjungan kerja ke Proyek JTB dan Banyu Urip, Kamis (22/04/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ESDM turut didampingi oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, President Exxon

Mobil Irtiza Sayyed, dan Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Awang Lazuardi.

Menurut Menteri Arifin, ada beberapa gangguan yang dialami proyek tersebut. Namun mengingat pentingnya proyek ini, Pemerintah sangat berharap agar pembangunan rampung pada tahun 2021.

“Betul-betul kita harapkan gas dari JTB bisa segera dihasilkan,” tandasnya.

Proyek fasilitas pemrosesan gas (*Gas Processing Facility/GPF*) JTB dapat memproduksi gas dan kondensat. Produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD. Optimasi desain melalui perubahan teknologi pada unit GPF menghasilkan potensi tambahan produksi hingga 20 MMSCFD sehingga terdapat peningkatan produksi penjualan *sales* gas dari 172 MMSCFD menjadi 192 MMSCFD.

Realisasi biaya GPF adalah US\$974,44 juta atau 73,40% dari *Authorization*

for Expenditure (AFE) US\$1.328 juta. Dalam masa pembangunan ini, jumlah tenaga kerjanya sebanyak 7.842 orang.

Selain membangun GPF serta fasilitas pendukungnya, pengeboran enam sumur pengembangan dan satu sumur *plug & abandonment* di Lapangan JTB telah rampung dilakukan. Hingga akhir Maret 2021, progres keseluruhan Proyek JTB sebesar 89,37%.

Gas yang diproduksi JTB diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gas untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sekaligus tercapainya kedaulatan energi nasional.

Proyek JTB diambil alih Pertamina (Pertamina EP Cepu/PEPC) dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Pada November 2017, b-to-b antara EMCL dan PEPC selesai dan secara resmi PEPC mengambil alih kepemilikan JTB. ●



Kunjungi Jambi, Dirjen Migas Rasakan Pengalaman Langsung Gunakan Jargas

Dirjen Migas Tutuka Ariadji mencoba langsung jaringan gas untuk rumah tangga (jargas) dalam kunjungannya ke Kota Jambi, Rabu (28/04/2021). Di salah satu rumah warga setempat yang telah teraliri jargas, Dirjen Migas, bersama Walikota Jambi Syarif Fasha, menunjukkan kepiawaiannya menggoreng telur mata sapi.

“Saya terharu ikut masak telur, di mana saya juga sudah beberapa tahun tidak masak telur sendiri. Untung insting saya muncul. Kalau tidak, malu juga bersaing dengan Bapak Walikota yang

jauh lebih ahli,” kata Tutuka sambil tertawa.

Tutuka tidak mengalami kesulitan saat memasak karena nyala apinya merata. Hal senada juga dikemukakan Emi, warga yang rumahnya dijadikan tempat menggoreng telur tersebut. Ia mengaku telah empat bulan menikmati jargas.

“Tidak ada kesulitan atau kendala pakai jargas. Apalagi kami juga mendapat kompor gratis. Mahal itu harganya,” kata Emi dengan nada gembira.

Memang bagi warga yang rumahnya dipasang jargas, Pemerintah juga melengkapinya dengan kompor 2 tungku yang diberikan secara cuma-cuma. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar dapat segera memanfaatkan gas bumi yang bersih dan hemat ini.

“Kami berharap adanya lagi pemasangan jargas untuk tahun 2022 dan akan ‘jemput bola’. Kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan dari Pemerintah ini,” ujar Syarif Fasha.



Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengungkapkan, Pemerintah telah membangun sekitar 13.000 sambungan rumah (SR) jargas di Kota Jambi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 SR telah teraliri dan sisanya akan segera diselesaikan.

Pembangunan jargas di Kota Jambi dilakukan mulai tahun 2012, 2017, 2019, dan 2020. Untuk tahun 2020, telah

dibangun 10.295 SR yang tersebar di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pasokan gas berasal dari PT Pertamina Hulu Energi. Pengoperasian instalasi jargas selanjutnya dilakukan oleh PT Pertagas Niaga bekerja sama dengan BUMD, yakni PT JII.

Menurut Tutuka, pembangunan jargas yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak 2009 ini, hingga

tahun 2022 masih akan dibangun dengan menggunakan dana APBN. Namun ke depan, Pemerintah akan mengembangkan jargas dengan skema kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU). Tujuannya agar jargas dapat terbangun secara masif sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan keuntungannya.



Dirjen Migas Pimpin Sosialisasi Kepmen ESDM tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji memimpin Sosialisasi Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) pada Setiap Tahapan Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi Sampai Dengan Titik Serah Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Selasa (20/04/2021). Acara yang berlangsung secara virtual ini guna menyebarluaskan pemahaman terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 30.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) pada Setiap Tahapan Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi Sampai Dengan Titik Serah oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Aturan yang ditetapkan tanggal 18 Februari 2021 ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan

operasional pemroduksian minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Kepmen ini merupakan pedoman pada tahapan uji coba pelaksanaan sistem jaminan kuantitas (quantity assurance/QA), diberlakukan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada wilayah kerja yang ditentukan oleh SKK Migas,” ujar Dirjen Migas Tutuka Ariadji pada kesempatan tersebut.

Dasar hukum penyusunan Kepmen ini adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dan Kepmen ESDM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan National Data Repository (NDR) Sektor ESDM dan Pelaksanaan Tugas Walidata di Kementerian ESDM.

Lebih lanjut Tutuka memaparkan, berdasarkan surat Deputy Pencegahan KPK tanggal 28 Agustus 2019 agar sistem QA ditujukan untuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas dan agar dapat dilaksanakan secara massif, telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 1/KEP/BSN/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia (PNPS) di mana salah satu judul SNI baru dari 11 usulan PNPS 2021 adalah sistem jaminan kuantitas untuk akuntabilitas dan transparansi alir material sub bidang migas yang berada pada Komite Teknis 75-01. Rancangan SNI telah disampaikan oleh Ditjen Migas kepada BSN tanggal 29 September 2020.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Kepala BSN ini, sejak tanggal 18 Februari hingga 1 April 2021 telah dilaksanakan pembahasan Draft

RSN1 Sistem jaminan kuantitas untuk akuntabilitas dan transparansi alir material sub bidang migas-Persyaratan oleh Ditjen Migas bersama Pusdatin ESDM, SKK Migas, Stranas PK, KPK, BSN, serta Komtek 75-01. “Diharapkan penetapan SNI QA oleh BSN pada Desember 2021” tambah Tutuka.

SKK Migas menargetkan di mana tahun 2021 dapat dicapai level M1-M3 (uji proses) dan M4 (analisa data)-M5 pada tahun 2022 untuk semua KKKS. Selain itu, PT Pertamina telah menyampaikan penilaian KPK atas uji coba M1-M2 terhadap 5 wilayah kerjanya dan akan diperluas penerapan sistem jaminan kuantitas sesuai target SKK Migas.

Hasil uji coba tersebut yang memenuhi syarat (>75%) Maturity-1 dan Maturity-2 (uji coba hanya M1/pemenuhan persyaratan dan M2/uji persyaratan dari sampai M5/konfirmasi analisa) yaitu:

1. Pertamina EP
 - Lapangan Jatibarang, Jawa Barat : 83%
 - Lapangan Prabumulih, Sumatera Selatan : 82,5%
 - Lapangan Sangatta, Kalimantan Timur : 83,5%
2. Pertamina Hulu Energi
 - West Madura Offshore : 100%
 - Jambi Merang : 96,5%

Ditegaskan Dirjen Migas, deklarasi kesiapan sistem jaminan kuantitas dari 66 KKKS (M1) kepada KPK melalui SKK Migas. “Dengan terbitnya Kepmen ESDM ini, semoga SKK Migas dan juga IPA, KKKS termasuk Pertamina diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan sistem jaminan kuantitas,” imbuh Tutuka.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam kesempatan yang sama mengatakan, komitmen dan upaya dalam pemberantasan korupsi, selalu menjadi prioritas Pemerintah, termasuk SKK Migas. Komitmen ini ditunjukkan dalam berbagai continuous improvement yang telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan

dan regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Kepmen ESDM Nomor 30.K/HK.02/MEM.M/2021 yang telah diterbitkan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya continuous tersebut,” tegasnya.

Dwi menjelaskan, QA adalah suatu pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya. Di mana QA ini akan menjadi bagian dari National Data Repository.

Ruang lingkup QA mulai dari monitoring produksi yaitu dari sumur kemudian ke fasilitas proses produksi, stop di terminal pengumpulan sampai di titik lifting.

Dwi melanjutkan, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas bukan usaha sederhana. Perlu kerja keras dalam mencapainya dan oleh karena itu, diharapkan dapat terbangun sinergi antara Pemerintah dengan KKKS.

“Dari hasil perluasan QA pada 66 KKKS, terdapat 50 KKKS yang sudah mengirimkan check list level M1, 15 KKKS mengirimkan check list namun tidak lengkap dan 1 KKKS tidak mengirimkan. Terhadap KKKS tersebut, telah dikirimkan surat teguran,” papar dia.

Fridolin Berek dari Stranas PK mengatakan, sesuai perintah Presiden, setiap dua tahun sekali, Tim Stranas PK menetapkan aksi pencegahan korupsi. Kepmen ESDM ini merupakan capaian dari

pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 yang dilanjutkan ke tahun 2020-2021.

Visi inisiatif ini adalah menjadikan sistem QA sebagai acuan dan kerangka kerja standar bagi para pihak dalam mengawal kegiatan usaha sektor hulu migas agar sejalan dengan aksi Stranas PK di fokus keuangan negara sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

Sedangkan misi inisiatif ini untuk jangka pendek adalah mengoptimalkan PNPB dari sektor hulu migas. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu mengawal pencapaian target hulu migas.

KPK mengharapkan agar melalui sosialisasi ini dapat memperkuat komitmen dan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Produksi Sub Holding Upstream Pertamina Taufik Adityawarman, mengatakan secara umum penerapan QA akan memberikan jaminan termasuk terhadap pelaku usaha mengenai kekayaan yang dimiliki di dalam bumi saat ini, potensi serta besaran porto folio yang dimiliki pelaku usaha. Selain itu, bagaimana mengubah jumlah cadangan migas yang diyakini tersebut menjadi produksi migas. Apalagi Pemerintah juga memiliki misi nasional tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar standar kaki kubik.

“Kita (negara) punya misi nasional tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar standar kaki kubik. Kami di Pertamina yang punya aset domestik dan internasional, tentu crude oil-nya kita akan bawa ke sini untuk ketahanan nasional. Sedangkan produksi yang di dalam negeri akan dimaksimalkan agar target tercapai,” katanya. ●

Menteri ESDM Lantik Direktur Pembinaan Program Migas Baru



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Jumat (21/05/2021). Sebelumnya, Dwi Anggoro Ismukurnianto menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Kerja Sama Migas pada Direktorat Pembinaan Program Migas pada Ditjen Migas.

Pelantikan Dwi Anggoro Ismukurnianto ini bersamaan dengan tujuh Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) lainnya di lingkungan Kementerian ESDM. Ketujuh pejabat lainnya yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Sunindyo Suryo Herdadi, S.T., M.T., sebagai Direktur Pembinaan

Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

2. Ir. Yose Rizal, M.Si., sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E., sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Waskito Tunggal Nusantara, S.Kom., M.T., sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud., sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P., Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.



7. Yuli Rachwati, S.H., sebagai Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Menteri ESDM dalam sambutannya pada pelantikan ini, meminta agar amanah dan kepercayaan yang

diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan profesional, dengan kesungguhan, integritas, dan berjuang serta bekerja membaktikan diri kepada bangsa dan negara.

Para pejabat yang baru dilantik akan menghadapi sejumlah tantangan baru di dalam tugas yang baru,

apalagi dilakukan dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Menteri Arifin meminta agar para pejabat harus dapat memahami berbagai tantangan pada masing-masing unitnya sekaligus mampu menjawab tantangan itu sendiri dalam waktu cepat. ●



Halalbihalal Virtual Ditjen Migas: Tekankan Pandai Bersyukur dan Tawakal

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengawali aktivitas kerja setelah libur Idul Fitri 1442 H dengan menggelar Halalbihalal secara virtual, Senin (17/05/2021). Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H, serta meminta agar seluruh pegawai pandai bersyukur dan selalu tawakal.

“Marilah kita bersama mengintrospeksi diri dan selalu pandai bersyukur karena apa yang kita peroleh adalah hasil ketekunan dan jangan lupa semua itu ada di tangan Tuhan YME. Kita selalu berikhtiar, tapi juga harus bertawakal, mendasarkan diri bahwa segala sesuatu adalah takdir yang diberikan Allah,” ucap Tutuka.

Tutuka juga mengingatkan agar para pegawai selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan YME serta terhindar dari hal-hal yang tidak mampu menerimanya. Selain itu, tidak bersikap jemawa karena dapat menyebabkan seseorang ‘terjatuh’,



bersikap hati-hati, sabar dan saling mengingatkan.

“Kalau ada yang salah, kita membiarkan maka dia termasuk orang yang salah dan itu tidak benar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Tutuka juga meminta agar para pegawai lebih tulus, ikhlas dan bersemangat dalam bekerja dan memelihara kerukunan. “Saya mengharapkan kita semua bisa bersama-sama melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan nikmati

pekerjaan. Kalau ada yang terasa berat, sebaiknya kita bisa bicarakan karena tujuan kita bersama-sama adalah meringankan beban masing-masing,” tambahnya.

Halalbihalal Ditjen Migas dihadiri oleh para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas, ASN serta Non ASN. Halalbihalal merupakan tradisi di Indonesia dan melekat pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini biasanya berupa acara pertemuan atau perkumpulan yang digelar untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. ●



Libur Lebaran, Pasokan BBM dan LPG Aman

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji Command Center PT Pertamina (Persero), Selasa (11/05/2021). Kunjungan ini dalam rangka memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Command Center fasilitas pemantauan operasi hulu dan hilir migas secara real time. Dalam kunjungan ini, terungkap bahwa pasokan BBM dan LPG selama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Dari data real time yang ditunjukkan, pasokan BBM dan LPG aman,” tegas Tutuka.

Ketahanan stok nasional untuk Premium mencapai 27,9 hari, Pertamax 24,7 hari dan Solar 21,3 hari. Sementara itu, Pertalite adalah merupakan pencampuran antara Pertamax dan Premium. Ketahanan LPG mencapai 15 hari dan minyak tanah atau kerosene 80,6 hari. Kemudian, stok Avtur cukup untuk 76,3 hari.

Secara umum, kondisi stok dan penyaluran BBM selama Ramadhan dan libur Lebaran naik 9,2 hari dari

rata-rata normal. Penyaluran LPG naik 2,5 hari dari kondisi normal dan penyaluran Avtur naik 1,4 hari dari rata-rata stok normal.

Untuk menjamin kecukupan energi bagi masyarakat, Pemerintah, melalui Pertamina, melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan stok dan volume penyaluran BBM dan LPG sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat di mana gasoline naik 8%, diesel naik 2%, LPG naik 5,4% dan avtur turun 3,8% dibanding rerata normal.

Upaya lainnya adalah memastikan produk BBM dan LPG dalam kondisi aman baik di Terminal BBM maupun Terminal LPG, serta di SPBU dan SPBBE. Total SPBU yang disiagakan berjumlah 7.469 terdiri dari 3.608 unit di Pulau Jawa dan 3.861 di luar Jawa. Sedangkan jumlah SPBBE yang disiagakan sebanyak 667, di mana agen PSO mencapai 4.152 dan non PSO 820. Untuk layanan avtur, tersedia 68 DPPU.

Pertamina juga menjaga ketersediaan pelumas di SPBU dan sarfas distribusi seperti 114 TBBM dan 23 TLPG.



Rampung, Pengadaan Lahan dan BED Kilang Tuban



Pengadaan lahan pada pembangunan Kilang Tuban di Jawa Timur telah rampung. Begitu pula dengan sisi engineering, Basic Engineering Design (BED).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (24/05/2021). Tutuka menjelaskan, setelah pengadaan lahan selesai 100%, saat ini tengah dilakukan land clearing tahap 3. Hingga akhir April 2021, proses ini mencapai 11,6%, lebih cepat dibandingkan rencana semula sebesar 2,74%.

“Persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk pengadaan lahan Perhutani juga telah terbit,” tambah Dirjen Migas.

Sedangkan dari sisi pekerjaan engineering, menyusul rampungnya Basic Engineering Design (BED), sedang dilakukan Front End

Engineering Design (FEED) yang hingga 30 April 2021 mencapai 0,6%. Pekerjaan FEED ditargetkan selesai pada bulan Januari 2022.

“Perkembangan lainnya adalah reklamasi lahan di mana proses persiapan tender pekerjaan reklamasi dimulai pada minggu keempat bulan April 2021,” jelas Tutuka.

Proyek Kilang Tuban merupakan proyek yang sangat strategis karena pembangunan kilang minyak akan terintegrasi dengan petrokimia, dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 300.000 barel minyak per hari dan produksi petrochemical mencapai 4.250 kilo ton per annum (ktpa).

Selain itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas Euro V (BBM ramah lingkungan) yaitu gasoline sebesar 80.000 barel per hari dan diesel sebesar 98.000 barel per hari.

Nilai capex untuk proyek tersebut sebesar US\$ 16 miliar.

“Proyek Kilang Tuban akan menyerap tenaga kerja sebanyak 20.000 orang pada saat konstruksi dan 2.500 pada saat mulai beroperasi,” kata Dirjen Migas.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Proyek Kilang Tuban, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) melalui Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu Pemerintah juga telah memberikan alokasi gas domestik dan fasilitasi untuk memberi kemudahan perizinan yang dibutuhkan oleh PT Pertamina. Pembangunan kilang minyak baru (GRR) dan peningkatan kapasitas kilang (RDMP) merupakan upaya Pemerintah meningkatkan ketahanan energi nasional. ●

Jelang Idul Fitri 1442 H, Dirjen Migas Teken Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6.E/PW.04/DJM/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Menjelang Hari Raya 1442/2021 yang diteken tanggal 7 Mei 2021. Surat ini dikeluarkan guna mengendalikan potensi terjadinya gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Pratama, para Koordinator dan Sub Koordinator, serta seluruh ASN di lingkungan Ditjen Migas.

Dalam Surat Edaran tersebut, Dirjen Migas mengimbau bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan kode etik dan menimbulkan risiko sanksi pidana.

Merujuk UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila PNS/ Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

“Mengimbau agar tidak melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Rata (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara tertulis maupun lisan karena merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” kata Dirjen Migas.

Selanjutnya, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang membutuhkan, disertai dengan penjelasan, taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk

selanjutnya dilaporkan ke Sekretariat Ditjen Migas guna diteruskan kepada Inspektorat V Kementerian ESDM.

Dirjen Migas juga meminta agar para Pejabat Tinggi Pratama, para Koordinator dan Sub Koordinator, serta seluruh ASN di lingkungan Ditjen Migas, melaporkan setiap penolakan atau penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK, dan informasi melalui surat elektronik di alamat pengaduan atau melalui aplikasi pelaporan ke gratifikasi@esdm.go.id atau online (GOL mobile) yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store dengan kata kunci pencarian GOL KPK, Gratifikasi KPK, paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

“Penaan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dapat dikenakan apabila diketahui terdapat ASN yang tidak melaporkan adanya penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas,” tegas Tutuka. ●

Sesditjen Migas Serahkan Bingkisan Lebaran dan Medical Kit



Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Sesditjen Migas) Alimuddin Baso secara simbolis menyerahkan bingkisan Lebaran kepada Pegawai ASN Ditjen Migas golongan I, II, Non ASN dan pegawai building management di Auditorium Migas, Jumat (07/05/2021). Penyerahan bingkisan Lebaran ini merupakan wujud kepedulian terhadap pegawai di lingkungan Ditjen Migas.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula paket medical kit Tahap I Tahun 2021 untuk seluruh Pegawai ASN, Non ASN dan pegawai building management, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Ditjen Migas.

“Penyerahan bingkisan Lebaran ini merupakan bentuk perhatian dari pimpinan kepada pegawai ASN golongan I, II, pegawai Non ASN dan building management. Ini bentuk silaturahmi kita, sehingga rekan-rekan dalam merayakan hari raya dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Sesditjen Migas Alimuddin Baso yang dalam acara ini didampingi oleh para

pejabat Eselon II dan Dharma Wanita di lingkungan Ditjen Migas.

Bingkisan Lebaran dibagikan kepada 220 pegawai, sedangkan medical kit sebanyak 700 paket dibagikan kepada seluruh pegawai, baik ASN, Non ASN serta pegawai penunjang lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin meminta agar para pegawai tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas di masa pandemi ini. “Pelayanan prima harus tetap dilakukan,” katanya.

Paket medical kit yang dibagikan terdiri dari masker medis,

desinfektan spray, hand sanitizer spray, multivitamin, vitamin C, dan madu. Dalam rangkaian acara ini, Dharma Wanita Ditjen Migas turut memberikan tali kasih kepada 11 pegawai. ●



Tingkatkan Pengawasan Peralatan dan Instalasi, Ditjen Migas Adakan Ditjen Migas Workshop Residual Life Assessment (RLA)

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas menggelar Workshop Residual Life Assessment (RLA) di Instalasi Kilang Migas di Serpong, Tangerang, Kamis (10/06/2021). Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan sinergi dalam pengawasan terhadap peralatan dan instalasi di industri migas, khususnya peralatan dan instalasi yang telah melewati umur layan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid membuka acara yang dihadiri oleh Koordinator Keselamatan Hilir Migas Ditjen Migas Wijayanto, perwakilan Kilang Refinery Unit PT Pertamina (Persero), dan Kilang PPSDM Cepu serta pihak-pihak terkait lainnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakhid Hasyim menyampaikan, sebagian besar kilang minyak di Indonesia telah melewati umur layan, yaitu di atas 25 tahun. Usia kilang yang terbilang sudah di atas rata-rata umur layan, membuat kilang-kilang tersebut membutuhkan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa kilang masih dalam kondisi yang aman dan andal dalam beroperasi. Perlakuan khusus tersebut salah satu yang terpenting adalah pelaksanaan Residual Life Assessment (RLA) atau Penilaian Perpanjangan Sisa Umur Layan.

"Kenyataan ini harus menjadi perhatian bersama karena semakin tua usia peralatan, risiko yang ditimbulkan semakin besar. Badan usaha harus lebih berhati-hati dan waspada serta harus selalu melakukan inspeksi di mana salah satunya adalah menghitung umur layan peralatan atau instalasi migas," ujar Wakhid.



Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 18/2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan peralatan dan Instalasi pada Kegoatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas umur layan desain dapat tetap digunakan setelah dilakukan perpanjangan sisa umur layan dan mendapat Persetujuan Layak Operasi dari Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakhid juga mengingatkan agar badan usaha tidak lupa memeriksa masa berlaku izin instalasi migas.

"Kadang-kadang kita dengan kesibukan sehari-hari dan mengingat peralatan yang begitu banyak jumlahnya, tidak menyadari bahwa izin berlakunya sudah habis. Bagi izin peralatan yang sudah habis, harus segera diusulkan perpanjangan ke Ditjen Migas untuk ditindaklanjuti," Wakhid mengingatkan.

Secara garis besar, tahapan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan pada

Instalasi dan/atau peralatan yang tidak diketahui atau melewati umur layan adalah sebagai berikut:

1. Re-engineering
Instalasi dan/atau perusahaan yang tidak memiliki dokumen teknis dan tidak diketahui umur layan desain, hanya dapat diberikan perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan desain ulang (re-engineering) dan penilaian sisa umur layan.
2. RLA
Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas umur layan, desain dilakukan perpanjangan sisa umur layan (RLA). RLA mengacu pada hasil re-engineering (jika dokumen teknis tidak ada).
3. Inspeksi
Dilakukan oleh Kepala Teknik atau dibantu perusahaan inspeksi. Inspeksi dilakukan mengacu pada rekomendasi RLA.
4. Pemeriksaan keselamatan
Dilakukan oleh Kepala Inspeksi dan/atau Inspektur Migas atau pejabat yang ditugaskan. ●



Pastikan Regulasi Diterapkan Badan Usaha, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kunjungi Jaringan Pipa PT MUI

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengunjungi pipa gas milik PT Majuko Utama Indonesia (MUI) di metering system PT Pertagas di Cilegon, Jawa Barat, Rabu (16/06/2021). Kunjungan ini guna memastikan penerapan regulasi oleh badan usaha.

"Pemantauan langsung ke lapangan ini untuk mengetahui sejauh mana badan usaha menjalankan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah serta memastikan kegiatan penyaluran migas berjalan efektif dan efisien," ujar Soerja.

PT Majuko Utama Indonesia (MUI) sendiri telah melakukan perpanjangan Izin Usaha sesuai Surat Keputusan Kepala BPKM Nomor 231/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 6 Mei 2021. MUI memiliki fasilitas pipa gas bumi dengan Ruas Transmisi dari MS Pertamina Gas Cilegon-PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin Kota Cilegon, Provinsi Banten sepanjang 12,815 km dengan kapasitas 40 MMSCFD dan diameter pipa 12 inci yang mengalirkan gas dari Pertamina EP-Lapangan Asset 3. Aliran

gas tersebut diangkut melalui pipa MUI yang berasal dari Gas Shipper PT Banten Inti Gasindo (BIG).

Berdasarkan hasil pemaparan dan pantauan di lapangan, menurut Soerja, masih banyak industri di sekitar Cilegon yang membutuhkan gas bumi. Untuk itu, badan usaha niaga migas harus lebih proaktif mencari pasar baru.

Soerja menilai, badan usaha, termasuk PT MUI, seharusnya mampu meningkatkan pemanfaatan

infrastrukturnya agar harga gas dapat lebih kompetitif. Dari kapasitas 40 MMSCFD, saat ini yang dimanfaatkan baru sekitar 6 MMSCFD.

Pemerintah RI sendiri terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Secara statistik, dari tahun ke tahun, pasokan gas untuk kebutuhan domestik menunjukkan tren yang positif. Hingga Oktober 2020, pemanfaatan gas bumi untuk domestik mencapai 63,16%. ●



Indonesia Tawarkan Enam WK Migas Baru



Pemerintah RI, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2021. Ada enam Wilayah Kerja (WK) migas yang ditawarkan pada putaran pertama ini, terdiri dari empat WK melalui mekanisme Penawaran Langsung dan dua WK melalui mekanisme Lelang Reguler.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan Pengumuman penawaran WK migas itu dalam rangkaian acara Oil and Gas Investment Day yang berlangsung

secara offline dan online, Kamis (17/06/2021). Kegiatan ini merupakan pre-event The IPA Convec 2021 yang akan diselenggarakan September mendatang.

Saat pengumuman keenam WK tersebut, Tutuka memaparkan, Pemerintah terus berupaya untuk membuat lelang WK migas yang lebih menarik dengan memperbaiki syarat dan ketentuan, seperti peningkatan bagi hasil kontraktor dengan memperhitungkan faktor risiko blok, Open Bid Signature Bonus, FTP 10%, penerapan harga DMO 100%

selama masa kontrak, dan fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (Cost Recovery atau Gross Split).

Selain itu, ketentuan pelepasan baru (tidak ada kewajiban pelepasan sebagian wilayah pada tahun ke-3 kontrak), akses data yang mudah melalui mekanisme keanggotaan Migas Data Repository (MDR) serta insentif dan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Enam WK migas yang ditawarkan pada tahap I adalah sebagai berikut:

A. Empat WK Migas melalui mekanisme Penawaran Langsung:



1. SOUTH CPP

Location: Riau Onshore
Size: 5,446.39 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G, 500 Km of 2D seismic, 50 Km² of 3D seismic dan 1 exploration well.



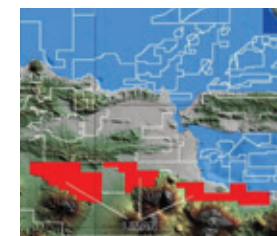
2. SUMBAGSEL

Location: South Sumatera onshore
Size: 1,751.04 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G dan 1 exploration well



3. RANGKAS

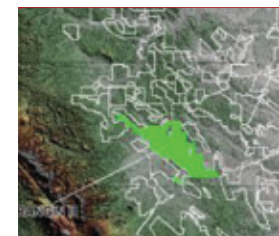
Location: Banten & West Java onshore
Size: 3,969.8 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G, 300 Km of 2D seismic



4. LIMAN

Location: East Java onshore & offshore
Size: 3,135 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G, 400 Km of 2D seismic

B. Dua WK Migas melalui mekanisme Lelang Reguler:



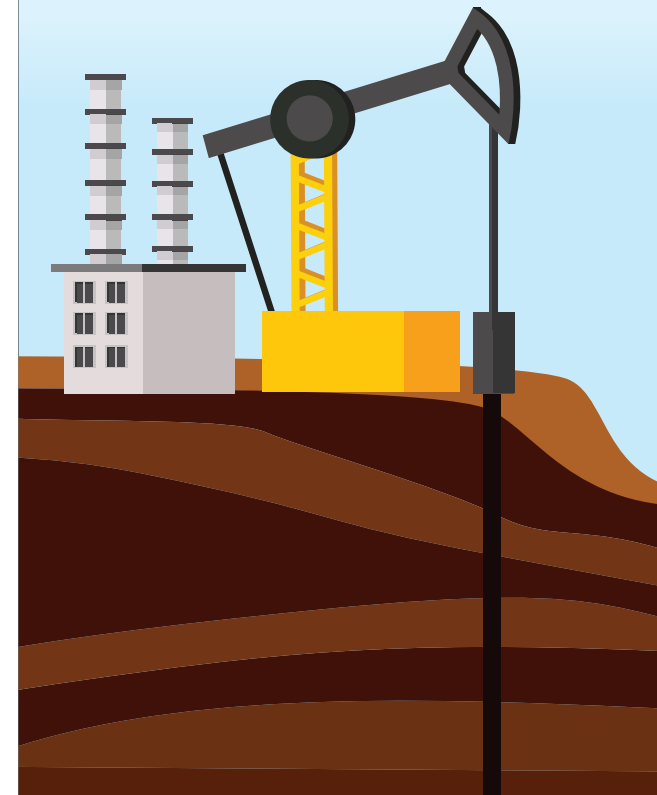
1. MERANGIN III

Location: South Sumatera and Jambi onshore
Size: 1,488.84 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G, 100 Km² of 3D seismic dan 1 exploration well.



2. NORTH KANGEAN

Location: East Java offshore
Size: 4,679.33 km²
Minimum of Firm Commitment: G&G, 200 Km² of 3D seismic dan 1 exploration well



Pemerintah mengundang perusahaan dalam dan luar negeri (BU/BUT) di bidang usaha hulu migas yang memiliki kemampuan finansial dan teknis, mampu memenuhi persyaratan Komitmen Pasti minimal tiga tahun, mampu memenuhi syarat dan ketentuan wilayah kerja tender serta kinerja dan rekam jejak yang baik untuk mengikuti putaran pertama Lelang WK Migas 2021 ini, dengan jadwal sebagai berikut:

A. Penawaran Langsung

Akses Bid Dokumen: 17 Juni 2021-28 Juli 2021
Penyerahan Dokumen Partisipasi: 28 Juli 2021-30 Juli 2021

B. Lelang Reguler

Akses Bid Dokumen: 17 Juni 2021-12 Oktober 2021
Penyerahan Dokumen Partisipasi: 12 Oktober 2021-14 Oktober 2021

Perusahaan yang berminat dapat mendaftar dan mengakses Dokumen Penawaran melalui website e-tender: <https://esdm.go.id/wkmigas> sesuai jadwal. ●

Dorong Iklim Investasi, Pemerintah Gelar Oil and Gas Investment Day

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka acara Oil and Gas Investment Day, Kamis (17/06/2021). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong iklim investasi hulu migas Indonesia guna mencapai target produksi minyak bumi 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Turut hadir dalam pembukaan Oil and Gas Investment Day antara lain Dirjen Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji.

“Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tetap memegang peran penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Pemerintah terus berusaha menciptakan iklim investasi yang menarik guna mencapai target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi (BSCFD) pada tahun 2030,” kata Arifin Tasrif dalam sambutannya.

Ia meneruskan, tren global dan lokal yang muncul saat ini seperti revolusi minyak serpih (shale oil) di Amerika Serikat, transisi energi, pandemi Covid-19, dan harga minyak yang rendah telah menciptakan pasar yang sangat kompetitif untuk mendapatkan investasi di bisnis hulu migas.

Menurut perusahaan konsultan migas seperti Woodmac, HIS, atau Rystad, Indonesia dianggap sebagai tempat yang menarik untuk investasi. Daya tarik tersebut lebih didorong oleh prospek sumber daya migas. Sementara itu, pada sistem fiskal dan risiko minyak dan gas, terdapat begitu banyak ruang untuk perbaikan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri

Arifin mengajak seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengembangkan sektor migas Indonesia.

“Kita harus membangun kemitraan strategis antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ucapnya.

Dalam acara ini, juga dilakukan penandatanganan sejumlah perjanjian strategis hulu migas, yaitu

1. Penyerahan Persetujuan Revisi Rencana Pengembangan (POD) Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan insentif fiskal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017.
2. Amandemen Rencana Pengembangan Lapangan (Plan of Development/POD) Coal Bed Methane (CBM) menggunakan skema Gross Split di Blok Tanjung Enim.
3. Kesepakatan Penjualan Gas
 - a. Penandatanganan Memorandum of

Understanding (MoU) antara Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) dengan PT Pupuk Indonesia, untuk pengembangan Proyek Amoniak-Urea dan Metanol di Bintuni.

- b. Penandatanganan MOU antara PetroChina International Jabung Ltd (PIJL) dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan PT Pertamina Hulu Rokan.
- c. Penandatanganan MOU antara Repsol Sakakemang B.V dengan PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Pertamina Hulu Rokan.
4. Penandatanganan Kerjasama Eksplorasi Hulu Migas antara ENI Indonesia dan SKK Migas.
5. Joint Study Agreement (JSA) kerjasama eksplorasi antara Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Posco International Corporation berdasarkan hasil eksplorasi Firmed Commitments oleh PHE Jambi Merang. ●



Miliki Kandungan Migas Potensial, Lapangan Maha-2 Ditargetkan On Stream Tahun 2024

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan plan of development (PoD) Lapangan Maha-2 terlaksana pada kuartal II tahun 2022 dan on stream tahun 2024. Data awal menunjukkan kandungan migas pada Lapangan Maha-2 cukup potensial untuk dikembangkan.

Saat Peresmian Proyek Merakes di Floating Production Unit (FPU) Jangkrik Kalimantan Timur, Selasa (08/06/2021), Menteri ESDM Arifin Tasrif optimis pengembangan Lapangan Maha-2 dapat dilaksanakan lebih cepat karena telah memiliki pengalaman sebelumnya dan tersedianya infrastruktur. Sumur appraisal Maha-2 terletak 16 km di sebelah Tenggara FPU Jangkrik yang dioperasikan oleh Eni. Cadangan migas di Lapangan Maha-2 ditemukan Eni West Ganal Ltd melalui pengeboran sumur appraisal Maha-2.

“Eni ini keahliannya di laut dalam dan Lapangan Merakes merupakan proyek ketiga laut dalam di Indonesia. Kita harapkan lapangan-lapangan migas dapat dikembangkan sesuai target waktunya,” kata Menteri ESDM.

Pada kesempatan sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan, pengeboran sumur di Lapangan Maha-2 yang terletak di Kutei Basin ini, akan dilaksanakan tahun 2021. Selanjutnya, PoD ditargetkan pada kuartal II atau III tahun 2022 dan on stream tahun 2024.

Target tersebut dengan pertimbangan bahwa selama dua tahun Lapangan Marakes akan berada pada puncak produksi dan mengutilisasi kapasitas FPU Jangkrik sebesar 750 MMSCFD. Pada tahun 2024, produksi Merakes mulai turun dan digantikan produksi migas dari Lapangan Maha-2.

Di Lapangan Maha-2, Eni berhasil menemukan 43 meter lapisan pasir bersih gas dengan karakteristik reservoir yang sangat baik di tingkat Zaman Pliosen. Uji produksi yang terbatas oleh fasilitas permukaan mencatat gas deliverability yang sangat baik dari reservoir yang mengalir pada clean up flow 33,9 MMSCFD Choke Position : 96/64 inci.

Pengujian dan coring reservoir yang dilakukan, berhasil menghimpun data penting yang dibutuhkan untuk mendukung studi pada persiapan rencana pengembangan Lapangan Maha, di mana dua sumur appraisal lainnya direncanakan akan dibor.

Eni merupakan operator Blok West Ganal melalui afiliasinya, Eni West Ganal Limited, yang memegang 40% participating interest, sementara Neptune West Ganal BV dan PT Pertamina Hulu West Ganal masing-masing memegang 30%. Eni telah beroperasi di Indonesia sejak 2001. ●





Tingkatkan Keekonomian Lapangan, Menteri ESDM Resmikan Proyek Merakes

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan proyek pengembangan Lapangan Merakes di Floating Production Unit (FPU) Jangkrik, Kalimantan Timur, Selasa (08/06/2021). Catatan penting dari pengembangan Lapangan Merakes adalah kemampuan sinergi untuk meningkatkan keekonomian lapangan.

Lapangan Merakes berada di Wilayah Kerja East Sepinggan. Dibangun dengan investasi senilai US\$1,3 miliar, proyek ini diharapkan meningkatkan produksi dan pemanfaatan gas bumi di Indonesia.

“Dengan diresmikannya Lapangan Merakes ini diharapkan kebutuhan gas bumi nasional dapat terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik, dan akan muncul ide, gagasan serta pemikiran baru untuk mendukung

pengembangan gas bumi secara keseluruhan,” kata Menteri ESDM dalam peresmian yang juga dihadiri oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji tersebut.

Proyek pengembangan Lapangan Merakes mulai onstream pada bulan April 2021 dan akan mengalirkan produksi gas sebesar 368 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada saat puncak produksi.

Lapangan Merakes dioperasikan oleh Eni East Sepinggan Limited (65%) yang bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan (15%) dan Neptune Energi East Sepinggan B.V. (20%). Pengembangan lapangan Merakes dirancang untuk masa produksi 20 tahun.

Lapangan Merakes yang merupakan pengembangan

lapangan gas laut dalam di lepas pantai Kutei Basin memungkinkan ENI dapat memaksimalkan sinergi dan meningkatkan ekonomi lapangan dengan infrastruktur terdekat.

“Produksi lapangan Merakes juga berkontribusi pada perpanjangan umur operasi kilang LNG Bontang, yang memasok LNG ke pasar domestik maupun ekspor,” tambah Menteri ESDM.

Target total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 31,72% pada Lapangan Merakes akan memiliki arti besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan Pemerintah sebesar US\$1,6 miliar serta akan membantu pemenuhan pasokan kebutuhan gas pipa di Kalimantan timur serta kebutuhan LNG, baik domestik maupun ekspor. ●



Pengapalan ke-700, Produksi Total Minyak Blok Cepu Lampau Target

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan pengapalan lifting ke-700 minyak mentah bagian Pemerintah dan Badan Kerja Sama Participating Interest (BKS PI) Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited kepada Pertamina di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (09/06/2021). Pengapalan ke-700 ini juga menandai total produksi kumulatif lebih dari 475 juta barel minyak. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan keseluruhan volume cadangan minyak terproduksi saat rencana awal Plan of Development (PoD) sebesar 450 juta barel.

“Terima kasih kepada Exxon atas capaian yang telah dihasilkan. Mulai dari penemuan cadangan yang hanya 450 juta barel hingga dapat mengidentifikasi sumber atau cadangan minyak Lapangan Banyu Urip menjadi 940 juta barel per hari. Produksi yang dimulai tahun 2016 sebanyak 165.000 barel per hari, menjadi lebih dari 200.000 barel per

hari,” ujar Arifin Tasrif.

Menurut Arifin, pencapaian yang luar biasa ini hanya bisa dihasilkan dengan kerja keras dan kemampuan teknis yang mumpuni. Diharapkan kemampuan ini dapat terus dikembangkan, agar dapat mengoptimalkan produksi migas di Indonesia.

Lifting minyak ke-700 juga menjadi milestone penting bagi ketahanan energi Indonesia serta memberikan harapan bahwa potensi hulu migas Indonesia masih menjanjikan. Minyak mentah yang di-lifting merupakan hasil produksi dari Blok Cepu, Bojonegoro, yang dialirkan melalui pipa sepanjang 95 kilometer ke Palang, Tuban, kemudian ditampung di FSO Gagak Rimang di lepas pantai Tuban, Jawa Timur. Minyak kemudian dikirim ke VLCC Success Enterprise milik Pertamina, untuk selanjutnya diangkut ke STS Tuban untuk diolah di kilang Pertamina guna memenuhi kebutuhan energi nasional.

Volume minyak yang di-lifting sebesar 1 satu juta barel, terdiri dari 850.000 barel bagian Pemerintah dan 150.000 barel lainnya bagian dari Badan Kerja Sama Participating Interest (BKS PI) Blok Cepu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifin juga mengapresiasi ExxonMobil Cepu yang dalam mengelola blok migas ini, selalu mengedepankan keselamatan kerja yang baik sehingga tidak pernah terjadi kecelakaan selama beroperasi. Kegiatan produksi minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, dimulai pada tahun 2008 dan fasilitas produksi utama mulai dioperasikan pada kuartal ke-4 tahun 2015. ●





Ditjen Migas Gelar Konsultasi Publik Jargas di Sejumlah Wilayah

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengadakan konsultasi publik jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di sejumlah wilayah. Konsultasi publik ini diadakan untuk menampung berbagai aspirasi di daerah terkait pembangunan jargas.

Salah satu kunci sukses pembangunan jargas adalah adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah (pemda) termasuk perizinan dan lahan, sedangkan dukungan masyarakat berupa kesediaan untuk beralih dari penggunaan LPG ke gas bumi (*willingness to connect*), kesediaan membayar (*willingness to pay*), dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

“Pembangunan jargas dengan menggunakan APBN terbatas jumlahnya. Untuk itu, Pemerintah mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di mana salah satunya tahapannya adalah studi pendahuluan,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema KPBU di Kota Bogor, Kamis (10/06/2021).

Pemerintah Kabupaten Bogor mengapresiasi rencana Pemerintah

membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga dengan skema KPBU.

“Pemkab Bogor sangat mendukung rencana (KPBU) ini karena kalau berdasarkan kemampuan daerah, tidak mungkin membangun jargas. Atas nama Pemkab Bogor, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian ESDM yang telah merespon keinginan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menggunakan jargas,” ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di kesempatan sama.

Dukungan serupa juga datang dari Pemkab Bekasi. Pembangunan jargas melalui skema KPBU dinilai Pemkab Bekasi merupakan terobosan agar gas bumi dapat dinikmati masyarakat secara meluas. Apalagi, terkadang masyarakat Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg.

“Pemerintah sudah bersusah payah melakukan Konversi BBM ke Gas, tapi di lapangan banyak yang ‘nakal’ sehingga dalam momentum tertentu terjadi kelangkaan. Kalau lagi langka, masyarakat bisa harus keliling Bekasi mencari LPG 3 kg. Ini merepotkan,” tutur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bekasi Abdur Rofiq pada Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema

KPBU di Kabupaten Bekasi, Selasa (15/06/2021).

Selain Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, sosialisasi serupa juga dilaksanakan di beberapa wilayah lain, seperti Kabupaten Bogor, Mojokerto, dan Pasuruan. Umumnya, pemerintah daerah mendukung pembangunan jargas di wilayahnya melalui skema KPBU, terlebih sudah merasakan manfaat besarnya, seperti Kabupaten Pasuruan.

“Kami sangat mendukung (jargas KPBU) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sementara ini memang masih ada masyarakat yang takut. Tapi ini tidak benar karena semua aspek sudah diperhitungkan. Masyarakat harus bantu karena nantinya masyarakat juga yang akan merasakan manfaatnya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tahun 2021 di Kabupaten Pasuruan, Kamis (24/06/2021).

Begitu pula dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang juga mendukung rencana pembangunan jargas dengan skema KPBU. Kabupaten Mojokerto sendiri menjadi salah satu daerah yang

ditunjuk sebagai pelaksana Studi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Skema KPBU.

“Dengan dipilihnya Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu kota atau daerah dalam studi pembangunan jargas skema KPBU 2021, kami berharap pembangunan jargas terus berlanjut dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Mojokerto, dengan tetap memperhatikan dampak

sosial dan dampak lingkungan yang mungkin muncul melalui program ini. Semoga ke depannya masyarakat Mojokerto dapat merasakan dampak pembangunan jargas,” ungkapnya saat Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema KPBU di Kabupaten Mojokerto, Selasa (22/06/2021).

“Pemkab Bogor sangat mendukung rencana (KPBU) ini karena kalau berdasarkan kemampuan daerah,

tidak mungkin membangun jargas. Atas nama Pemkab Bogor, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian ESDM yang telah merespon keinginan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menggunakan jargas,” ujar Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan pada acara sejenis di Kabupaten Bogor, Kamis (17/06/2021). ●

Ini Rencana Pemerintah Salurkan LPG 3 Kg



Pemerintah telah menetapkan empat rencana dalam penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2021. Untuk tahun ini, kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 7,5 juta metrik ton (MT).

Empat rencana tersebut adalah pertama, meningkatkan jumlah Sub Penyalur/Pangkalan (satu desa satu sub penyalur), agar penyaluran LPG 3 kg dapat mencapai desa-desa yang telah dikonversi dan dapat mengurangi penjualan LPG 3 kg ke pengecer.

Kedua, melakukan pengembangan jaringan pendistribusian LPG tabung 3

kg untuk daerah yang baru di konversi dan daerah yang akan dikonversi.

Rencana ketiga, bekerja sama dengan semua stakeholder yaitu Ditjen Migas, Pemda, PT Pertamina, Hiswana Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran LPG 3 kg sehingga tidak terjadi over kuota.

“Sebanyak 12 Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan 154 Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota telah membuat kebijakan penggunaan LPG Non Subsidi bagi ASN dan non usaha mikro,” kata Dirjen Migas Tutuka Ariadji dalam Rapat

Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (24/5).

Keempat, meningkatkan penjualan LPG Non PSO dengan melakukan trade in, diskon refill kepada restoran besar, hotel dan lain-lain.

Hingga April 2021, realisasi penyaluran LPG 3 kg sebesar 2.416.193 MT atau 32,21% dari kuota nasional. Sementara itu, outlook LPG 3 kg tahun 2021 diperkirakan sebesar 7.473.603 MT. Realisasi pembayaran sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp 15,04 triliun.

Dalam RDP ini, Komisi VII DPR meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada realisasi penyaluran LPG 3 kg agar target dapat terpenuhi dan tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan.

DPR juga meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi implementasi program LPG 3 kg termasuk memperkuat penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran program subsidi tersebut.

Rapat juga menyepakati akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait sistem pendistribusian dan pengawasan subsidi LPG 3 kg. ●

Perluas Penerima Manfaat, Tiga Tahap Kontrak Jargas Ditandatangani



Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), telah menandatangani kontrak pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di tahun 2021 yang terbagi dalam tiga tahap. Pembangunan jargas bertujuan memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan serta mengurangi beban subsidi BBM atau LPG pada sektor rumah tangga.

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jargas Tahap I Tahun Anggaran 2021 senilai Rp467.791.556.196 dilakukan di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Rabu (10/03/2021). Penandatanganan kontrak disaksikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji.

Kontrak pembangunan jargas yang ditandatangani pada tahap I berjumlah lima paket dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) sebanyak 60.875 SR. Kontrak ini merupakan separuh atau 50% dari total SR yang

dibangun tahun 2021, yaitu sebanyak 120.776 SR di 21 kabupaten/kota.

Secara terperinci, kelima paket ini terdiri dari Paket 1 ini di antaranya meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 SR, Paket 12 meliputi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sebanyak 8.273 SR dan Paket 15 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 17.506 SR.

Adapun kontrak pembangunan jargas yang ditandatangani pada tahap I berjumlah 5 paket dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 60.875 SR. Jumlah tersebut setara dengan separuh atau 50% dari total SR yang dibangun tahun 2021 di 21 kabupaten/kota yang sebanyak 120.776 SR.

Selang sepekan atau Senin (15/03/2021), kontrak pembangunan jargas tahap II tahun 2021 kembali ditandatangani di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta. Total kontrak yang ditandatangani ini senilai Rp137,13 miliar untuk membangun 15.440 SR. Perinciannya, untuk pembangunan jargas di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang sebanyak 8.541 SR senilai Rp66,283 miliar dan jargas di

Kabupaten Banyuwangi sebanyak 6.899 SR senilai Rp70,85 miliar.

Masih di tempat sama, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan jargas tahap III tahun 2021 sebanyak 44.461 SR dengan nilai Rp372,134 miliar, Jumat (09/04/2021). Pembangunan jargas tahap III yang ditandatangani ini terdiri dari tiga paket yang meliputi tujuh lokasi, yaitu Kabupaten Wajo 5.750 SR, Kabupaten Banggai 5.005 SR, Kabupaten Bojonegoro 10.000 SR, Kabupaten Lamongan 5.935 SR, Kota Mojokerto 5.699 SR, Kabupaten Mojokerto 5.935 SR, dan Kabupaten Jombang 6.137 SR. Dengan penandatanganan tersebut, berarti seluruh kontrak pembangunan jargas tahun ini yang dibagi dalam 10 paket telah diteken.

Program jargas telah dilaksanakan Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan sampai dengan saat ini total telah terpasang 535.555 SR. Target pembangunan jargas berdasarkan RPJMN sebesar 4 juta SR pada tahun 2024. Jargas yang dibangun pada tahun ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020. Namun, anggarannya direalokasi untuk penanganan Covid-19. ●

Dorong Kemudahan Berusaha, Kementerian ESDM Luncurkan Aplikasi SKUP dan APDN Migas

Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), meluncurkan Aplikasi Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dan APDN Migas, Rabu (30/06/2021). Aplikasi SKUP dan APDN Migas ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung kemudahan berusaha pada subsektor kegiatan usaha migas.

Peresmian dilakukan secara terbatas di Ruang Strategis Gedung Ibnu Sutowo, Kuningan, Jakarta oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji, didampingi Direktur Pembinaan Program Migas Dwi Anggoro Ismukurnianto, SKK Migas, pejabat terkait lainnya, serta badan usaha penunjang migas.

"Pengembangan Aplikasi SKUP Migas merupakan sarana Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemutakhiran data kemampuan perusahaan penunjang migas pada daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) Migas yang digunakan sebagai acuan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha migas," ujar Tutuka Ariadji dalam kesempatan tersebut.

Daftar APDN juga merupakan tools untuk melakukan pengendalian impor barang operasi migas dalam upaya meningkatkan kapasitas nasional yang sekaligus memberikan kemudahan berusaha bagi usaha penunjang migas untuk mendukung kegiatan operasi serta peningkatan investasi pada subsektor migas.

SKUP Migas adalah bentuk apresiasi bagi badan usaha penunjang yang memiliki kemampuan nyata meliputi aspek legal, teknis, jaringan pemasaran, dan purna jual. SKUP Migas juga merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan produk dan



jasa dalam negeri untuk mendukung kegiatan migas.

Saat ini, telah diterbitkan SKUP kepada 234 perusahaan bidang industri penunjang migas dan 363 perusahaan jasa penunjang migas yang kemudian dipublikasikan pada laman APDN Migas sebagai media promosi perusahaan dan produk barang dan/atau jasa dalam negeri yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa serta sebagai instrument untuk melakukan pengendalian impor barang operasi pada kegiatan usaha migas.

Usaha industri migas terdiri dari industri peralatan dan material, sedangkan jasa penunjang migas terdiri atas jasa konstruksi dan non konstruksi. Di dalam APDN Migas, setiap pengguna dapat melihat secara detail informasi seperti legalitas perusahaan, system manajemen, spesifikasi produk, sertifikasi produk, nilai TKDN, kemampuan produksi, pengalaman suplai, kapasitas produk dan lainnya yang telah mampu dibuat oleh perusahaan barang dan/atau jasa dalam negeri.

"Diperlukan partisipasi bersama untuk dapat memberikan kontribusi yang

berkelanjutan dalam meningkatkan dan menumbuhkembangkan produk dalam negeri yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas nasional agar dapat bersaing secara global," kata Tutuka.

Dalam peluncuran Aplikasi SKUP Migas dan APDN Migas ini, Dirjen Migas kembali mengingatkan bahwa saat ini kegiatan usaha migas menghadapi tantangan untuk menghadapi pergeseran trend operasi migas dari darat dan laut dangkal ke laut dalam sehingga membutuhkan barang operasi berteknologi tinggi. Produk dalam negeri yang belum dapat menyuplai kebutuhan industri migas, dan keterlambatan pengiriman berisiko tertundanya kegiatan operasi. Harga minyak dan gas bumi yang tidak stabil serta kontrak gross split yang menuntut harga produk dalam negeri untuk lebih efisien dan kompetitif.

Oleh karena itu, sinergi stakeholder, yaitu Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS dan Produsen Dalam Negeri, dalam program pembinaan produk dalam negeri dan substitusi impor diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menciptakan produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi, mutu, dan kebutuhan operasi. ●

Pemerintah Bagikan 56.000 Paket Konkit Tahun Ini



Dirjen Migas Tutuka Ariadji turut menyaksikan Penandatanganan Surat Pekerjaan Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran Tahun Anggaran 2021 di Auditorium Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Senin (21/06/2021). Pada tahun ini, Pemerintah menargetkan akan membagikan 56.000 unit paket konversi, terdiri dari 28.000 unit untuk nelayan dan 28.000 unit untuk petani.

Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran tahun ini akan dibagikan di 54 kabupaten/kota. Sementara itu, Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran akan dibagikan di 50 kabupaten/kota.

Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran telah dilaksanakan

Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sejak tahun 2016. Hingga saat ini, total telah terkonversi sebanyak 85.859 unit pada program tersebut. Tiga tahun setelah dimulainya Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran, Ditjen Migas mulai melaksanakan Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran. Sampai sekarang, telah terkonversi sebanyak 11.000 unit pada program tersebut.

PT Pertamina (Persero) ditugaskan Pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut secara teknis sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan

Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.

Dalam penandatanganan di atas, Tutuka meminta Pertamina membantu Pemerintah menyukseskan program ini. Dia juga mengharapkan bantuan Pemerintah ini dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaannya tidak ada pungutan apapun sehingga apabila ada yang mengatasmakan pimpinan Kementerian ESDM agar tidak dilayani serta bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tetap menjaga integritas,” tegas Tutuka.

Pertamina menargetkan akan menyelesaikan pendistribusian paket konversi ini pada akhir November 2021, dengan tujuan untuk mempermudah proses administrasi.

Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BGG) untuk Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran adalah salah satu program yang mendukung diversifikasi energi. Pemilihan LPG sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan dan petani karena sudah dikenal di masyarakat. Selain itu, kinerja mesin penggerak atau mesin pompa air yang menggunakan LPG relatif sama untuk motor berdaya rendah serta ramah lingkungan.

Program ini juga bermakna kemudahan akses energi dimana nelayan dan petani diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan. Perekonomian nelayan dan petani juga terdampak karena dapat mengurangi biaya operasional sekitar 30%–50% dibandingkan dengan penggunaan BBM. ●

Ditjen Migas Gelar Workshop Pengenalan Industri Penyimpanan BBM

Ditjen Migas menggelar Workshop Pengenalan Industri Penyimpanan Bahan Bakar Minyak secara virtual, Rabu (30/06/2021). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait industri hilir migas.

“Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas guna mendukung setiap tugas yang diembannya supaya menjadi lebih optimal. Selain itu, mendukung dalam penguatan kompetensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam workshop tersebut.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari PT Jakarta Tank Terminal (Vopak dan AKR Group) di mana ASN diharapkan dapat memahami seluk beluk industri penyimpanan BBM langsung dari pelaku usaha.

Melalui workshop ini, ASN di lingkungan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir diharapkan dapat menambah wawasan tentang seluk beluk industri penyimpanan BBM antara lain terkait proses bisnis, perkembangan, dan tantangannya. Selain itu, kebijakan-kebijakan apa saja, baik bisnis maupun keteknikan, yang diperlukan untuk mendukung berkembangnya industri ini.

“ASN diharapkan juga dapat mendapatkan pemahaman bagaimana industri ini berperan dalam mendukung industri migas dan ketahanan BBM nasional,” tambah Soerjaningsih.

Handoko, selaku Team Project Manager dan Akuisisi Vopak,

dalam paparannya menyampaikan, PT Jakarta Tank Terminal (JTT) merupakan joint venture antara AKR Corp dan Vopak. Adapun unit bisnis Vopak lainnya di Indonesia adalah Terminal di Merak untuk menyimpan bahan kimia.

Vopak memiliki pekerja yang multikultural dan ini mengajarkan banyak hal. Pekerja Vopak juga dituntut untuk selalu berpikir ke depan. Sebagai contoh, terhadap perubahan iklim dan energi transisi yang terjadi saat ini, Vopak diharapkan dapat memberikan kontribusinya. Perubahan yang terjadi di dunia tidak boleh menjadikan perusahaan menjadi turun atau ‘mandek’, melainkan berkembang seiring perkembangan zaman.

Terkait bisnis penyimpanan BBM di Indonesia, secara keseluruhan Handoko menilai pasarnya masih cukup besar. Ini sejalan dengan pembangunan kilang yang dilakukan Pemerintah sekarang ini. Meski demikian, pelaku usaha tetap harus menyiapkan diri terhadap perubahan seperti penggunaan mobil listrik.

“Ketahanan energi masih perlu energi fosil. Ini masih menarik bisnisnya.

Tapi kita harus lihat ke depan kalau Indonesia juga akan beralih ke mobil listrik. Kita akan lihat apakah perlu modifikasi dan sebagainya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Handoko menyampaikan masukan perlunya koordinasi antarinstansi karena saat ini masih terjadi tumpang tindih.

Sementara itu, Ferdy Iwan selaku Terminal Manager JTT menyampaikan, konsumsi BBM Indonesia cukup besar yaitu 63,9 juta kiloliter (KL) per tahun, di mana 41,13 juta KL merupakan non subsidi.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan, memerlukan distribution hub yang besar di beberapa titik strategis untuk menyalurkan BBM. Kenyataan ini menggambarkan bahwa bisnis tangki penyimpanan BBM sangat diperlukan.

Selain terkait aspek bisnis, JTT juga memaparkan terkait proses operasional Terminal BBM oleh Deni Umbara selaku Operation Manager JTT dan memaparkan proses pemeliharaan Terminal BBM oleh Rahman Idris selaku Maintenance Manager JTT. ●



Ditjen Migas Sosialisasikan Persiapan SKP Berbasis Hasil Kinerja 2021

Ditjen Migas menggelar Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode Juli-Desember 2021, Rabu (16/06/2021). Sosialisasi ini penting menyusul terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut membawa transformasi dalam Penyusunan SKP.

“Jadi, kalau Januari sampai dengan Juni kita masih memakai SKP model sebelumnya, maka transformasi tahap kedua pada bulan Juni sampai dengan Desember memakai model transformasi fungsional,” ungkap Sekretaris Ditjen Migas Alimuddin Baso pada acara tersebut.

Pada kegiatan yang digelar secara fisik dan daring bersama para koordinator, sub koordinator serta para pegawai di lingkungan Ditjen Migas tersebut, Alimuddin juga mengingatkan tujuan dari amanat Peraturan Menpan-RB No. 8 Tahun 2021 adalah untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/unit kerja/atasan langsung ke dalam Sasaran Kinerja Individu. Sasaran Kinerja Individu atau SKP ini yang nantinya menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

Penyusunan rencana SKP dimaksud, sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Menteri PAN-RB No. 8 Tahun 2021 dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi



dan pejabat fungsional. Oleh karena itu, perlu untuk menyelaraskan kinerja dari tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan jabatan di bawahnya.

“Kita harapkan SKP ini akan mempermudah identifikasi seluruh kegiatan kita dan juga sebagai catatan terhadap aktivitas kita dalam satu tahun. Kematangan bapak dan ibu, baik itu kompetensi dan leadership, akan memberikan kontribusi bagi performance personal-nya, lebih jauh untuk menunjang kinerja Ditjen Migas ke depan,” pungkas Alimuddin.

Kegiatan yang diinisiasi oleh unit Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Sumber Daya

Manusia (SDM) Kementerian ESDM dan juga Kementerian PAN-RB.

Adapun tujuan pertemuan dimaksud antara lain, pertama, memberikan pemahaman kepada Pegawai Ditjen Migas tentang konsep penyusunan SKP berdasarkan Permen PAN-RB No. 08 Tahun 2021. Kedua, memberikan pemahaman kepada Pegawai Ditjen Migas tentang tahapan penyusunan SKP berdasarkan Permen PAN-RB No. 08 Tahun 2021. Ketiga, mendorong Pimpinan dan Pegawai Ditjen Migas untuk dapat segera menyusun SKP berdasarkan Permen PAN-RB No. 08 Tahun 2021 melalui Dialog Kinerja. ●

Knowledge Sharing: Menghadapi Tantangan Pengelolaan SDM di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak sendi kehidupan manusia. Berbagai perubahan tersebut berlangsung sangat cepat sehingga menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan beradaptasi yang cepat pula untuk menghadapi tantangan di era pandemi Covid-19.

Itulah inti dari Sharing Knowledge bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dengan tema “Tantangan Pengelolaan SDM di Era Pandemi, Bagaimana Menjaga Profesionalitas, Mempererat Engagement, Menjalin Komunikasi yang Efektif?” pada Rabu (23/06/2021).

Dalam kegiatan Sharing Knowledge kali ini, Ditjen Migas bekerja sama dengan Human Resources Migas Community (HRMC). HRMC sendiri adalah komunitas human resources (HR) Indonesia yang berkecimpung di bidang minyak dan gas bumi yang anggotanya berasal dari instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

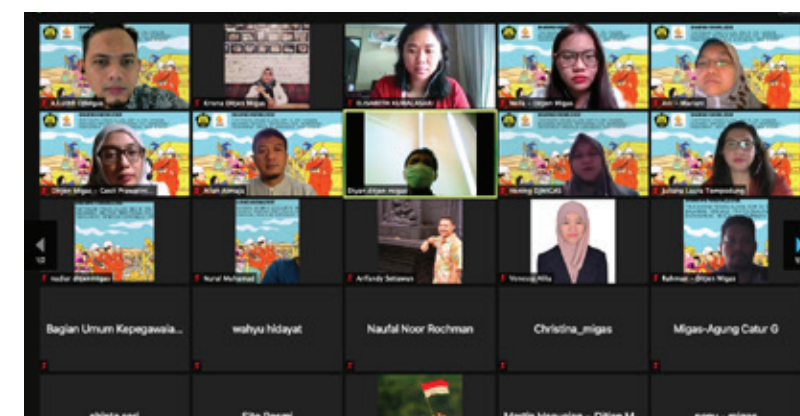
Sekretaris Ditjen Migas, yang diwakili oleh Plt Koordinator Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Diyan Wahyudi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di dalam instansi Pemerintah perubahan ini tentunya ada di beberapa level. Di puncak Pimpinan, misalnya, kepemimpinan yang sifatnya birokratis sudah mengarah ke sisi layaknya korporasi. Hal ini terlihat dari beberapa Menteri dan level Pimpinan tinggi lainnya berasal dari dunia usaha. Lalu, di

level menengah kasubdit/kasie, juga dilakukan perubahan melalui proses pendidikan pelatihan, yang dulu sifatnya dilayani sekarang lebih ke proses melayani. Terakhir, di level staf, perubahan dilakukan dengan memunculkan agen perubahan.

“Tentu juga ini kita terus berproses dan melihat serta mengambil pengalaman dari dunia usaha apa yang bisa kita ambil dan kita adopt. Mungkin, 20 tahun lalu masih terngiang di benak kita kalo PNS (ASN) sesampainya di kantor duduk, baca koran sambil ngopi. Nah, itu udah 20 tahun lalu, PNS (ASN) zaman old. Sekarang ini, PNS (ASN) kekinian, ya seperti teman-teman agen perubahan ini,” papar Diyan.

Salah satu narasumber HRMC dari Culture and Chains Management PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) Alan menyampaikan, perubahan sangat penting. Teknologi dan inovasi juga berubah. Dulu, tidak akan pernah terpikir dalam benak kita bahwa akan mengalami masa pandemi seperti sekarang dan akan bekerja secara online dari rumah seperti saat ini.

“Jadi memang ini sekarang era-nya berubah sangat cepat dan bagaimana caranya kita menangani perubahan ini dan budaya ini sekarang menjadi suatu hal yang penting, misalnya sekarang ini bagaimana cara kita mengontrol pegawai kita yang bekerja di rumah, tapi dituntut untuk tetap high performance culture,” jelas Alan. ●



April 2022, Kementerian ESDM dan Stakeholder Siap Implementasikan Standar Euro 4 pada Kendaraan Diesel

Kementerian ESDM dan stakeholder siap menerapkan kebijakan penerapan standar emisi Euro 4 pada kendaraan diesel di Indonesia yang bertujuan mengurangi emisi rumah kaca. Semula, kebijakan ini direncanakan terlaksana pada April tahun ini. Namun, akibat pandemi Covid-19, pelaksanaannya ditunda menjadi 1 April 2022.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Rencana Program Kerja PT Pertamina (Persero) terkait Supply-Demand,

Jaringan Distribusi, dan Kesiapan Fasilitas dalam Penyediaan Bahan Bakar Jenis Solar di Indonesia, Rabu (23/06/2021). Rapat virtual ini digelar Ditjen Migas untuk mengetahui kesiapan badan usaha migas terkait penerapan aturan tersebut.

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid Hasyim, Tenaga Ahli Menteri ESDM Nanang Untung, mewakili Dewan Energi Nasional adalah Dr. Ir. Musri, Koordinator Standardisasi

Migas Ditjen Migas Yunan Muzaffar, wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Pertamina, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Organda serta produsen kendaraan diesel, seperti Hino Motor, Daimler, Mitsubishi, dan Tata Motor.

Dalam rapat tersebut, Manager Product & Service Development Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Choerniadi Tomo menyatakan kesiapan untuk

memproduksi BBM jenis Solar dengan bilangan setana 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm serta akan menyalurkan produk dengan menggunakan saluran distribusi Solar Pertamina Dex.

“Mudah-mudahan, bisa siap di tanggal 1 April 2022, sesuai dengan keinginan stakeholder bersama,” katanya.

Suplai Pertamina Dex dengan sulfur maksimal 50 ppm ini berasal dari empat kilang, yaitu RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU IV Cilacap. Dipaparkan pula, sebaran availability Pertamina Dex di kabupaten/kota masing-masing provinsi dengan target 2.055 outlet pada 31 Desember 2021. Jumlah ini akan meningkat pada April 2022.

“Sedangkan untuk empat daerah yang belum menyediakan Pertamina Dex, kami juga memastikan produk tersebut akan siap pada tahun 2021, yaitu di Tarakan, Ternate, Jayapura, dan Ambon. Kalau masih ada daerah lain yang belum siap, kami akan kirimkan dalam bentuk kemasan jerigen,” paparnya.

Lebih lanjut Choerniadi memaparkan, timeline produksi Pertamina Dex Euro 4 dimulai pada Agustus 2021. Sebagian akan disimpan di tangki yang ada, sebagian di top up di tangki Pertamina Dex eksisting yang kandungan sulfurnya sekitar 100 hingga 150 ppm.

Pada kesempatan sama, Gaikindo mendukung agar penerapan Euro 4 untuk kendaraan diesel mulai 1 April 2022.

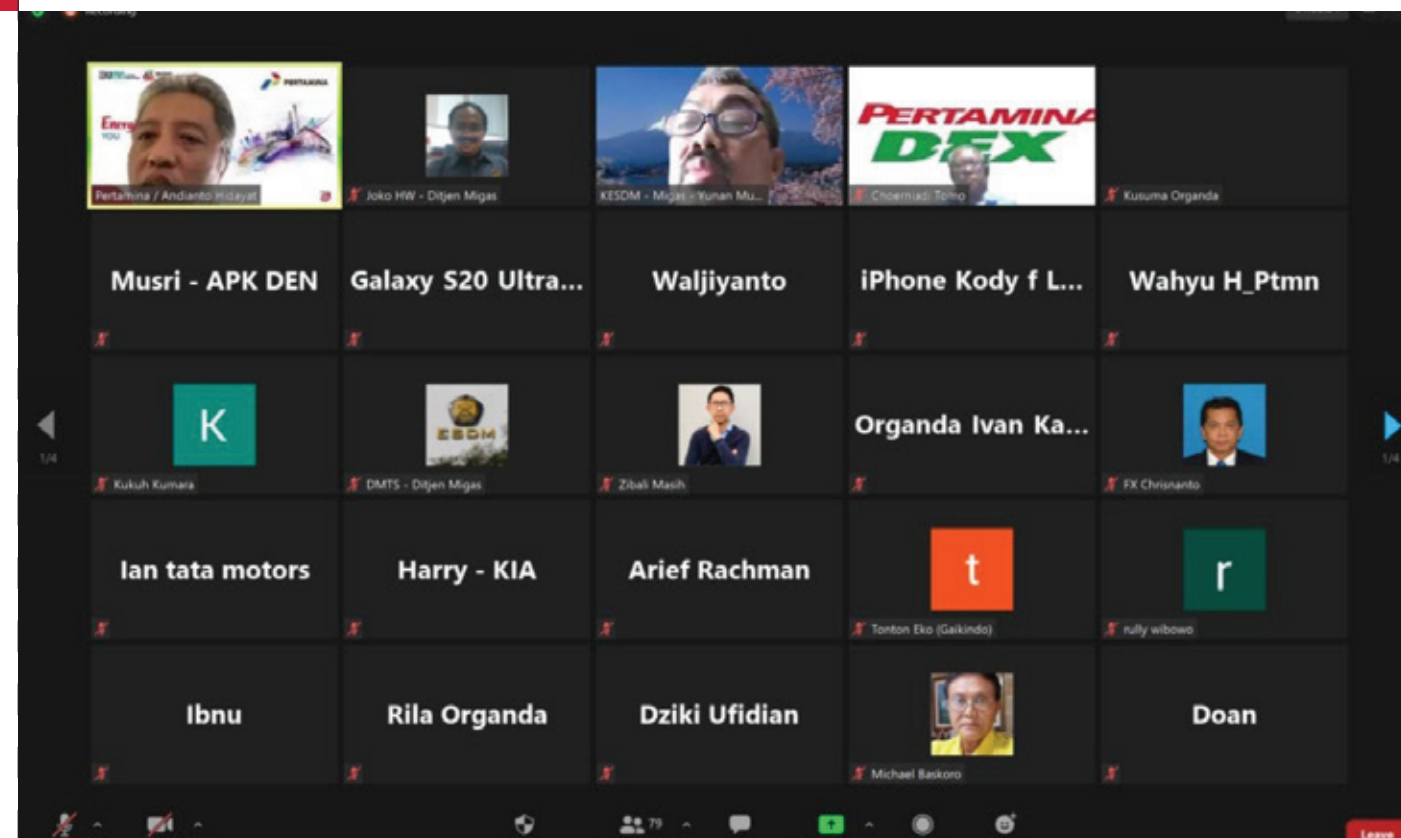
“Gaikindo dari awal selalu support program Pemerintah mengenai perbaikan lingkungan, termasuk pengurangan bahan bakar. Penerapan bahan bakar diesel Euro 4 sebaiknya tetap dilaksanakan bulan April 2022. Selain kami mempersiapkan unit kendaraan, tentunya perlu mempersiapkan macam-macam lainnya, seperti lab uji mesin,” kata Abdul Rochim, Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Gaikindo.

Mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kasubdit Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Ratna Kartikasari menyampaikan ucapan terima kasih kepada stakeholder karena telah mendukung program peningkatan kualitas udara di Indonesia melalui penerapan Euro 4 pada kendaraan diesel yang akan dilaksanakan pada 1 April 2022.

Aturan Euro 4 tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, yang ditandatangani pada Maret 2017. Aturan ini berlaku empat tahun setelah ditetapkan.

Selanjutnya pada 30 Desember 2020, Dirjen Migas Kementerian ESDM menetapkan Keputusan Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri. ●



Bangkitkan Industri Hulu Migas, Menteri ESDM Ajukan Insentif Fiskal



Hulu migas merupakan salah satu industri yang terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19. Guna menggairahkan iklim investasi hulu migas Indonesia, Menteri ESDM Arifin Tasrif akan mengajukan insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan.

“Kita sedang menyiapkan satu proposal ke Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan-keringanan fiskal lebih lanjut dan ini akan kita bahas dalam rapat internal dengan Kemenkeu,” papar Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (02/06/2021).

Insentif fiskal ini antara lain terkait perpajakan untuk wilayah kerja migas yang tengah dikelola KKKS. Usulan ini juga merupakan masukan dari Indonesian Petroleum Association (IPA), terutama terkait pencapaian target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030.

“Umumnya, mereka (IPA) mendukung (produksi) minyak 1 juta barel. Tapi di sisi lain, (mereka) memberikan masukan bahwa harus ada fiskal term yang bisa memberikan keringanan. Ini yang sedang diupayakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan di antara kita,” tambahnya.

Lebih lanjut Menteri ESDM mengungkapkan, kondisi pandemi yang telah berlangsung lebih dari satu tahun mengakibatkan penurunan permintaan migas. Hal ini menyebabkan KKKS mempertimbangkan kembali program-program kerjanya. Berdasarkan data Kementerian ESDM,

capaian 15 KKKS utama rata-rata di bawah target. Penurunan produksi juga lantaran keadaan sumur-sumur migas yang sudah tua sehingga lebih banyak menghasilkan air ketimbang migas.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti melalui skema cost recovery dan split atau bagi hasil yang lebih menarik. Ini dilakukan setelah melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara tetangga.

Kenyataan lainnya adalah beralihnya KKKS besar ke energi terbarukan. Selain itu, sejalan dengan diberikannya insentif, temuan-temuan besar seperti di Brazil, Meksiko, dan Guyana, membuat KKKS pindah ke negara-negara tersebut.

“Sebagai ilustrasi, sekarang KKKS besar mengurangi capex untuk investasi besar. Inilah yang harus kita antisipasi,” tegas Menteri ESDM. ●

Investigasi Kebakaran, Menteri ESDM dan Dirjen Migas Kunjungi Kilang Balongan



Menteri ESDM Arifin Tasrif, didampingi Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Bupati Indramayu Nina Agustina, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, mengunjungi Kilang Balongan, Sabtu (03/04/2021). Kunjungan ini guna meninjau langsung lokasi kebakaran di Kilang Balongan yang terjadi pada Senin (29/03/2021). Investigasi mendalam pun dilakukan untuk mencari penyebab insiden tersebut. Dalam investigasi tersebut, Pemerintah juga melibatkan lembaga internasional.

Menteri ESDM dan DPR Sepakati Asumsi Makro Sektor ESDM dan Pagu Indikatif Tahun 2022



Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Komisi VII DPR menyepakati Asumsi Makro Sektor ESDM dan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022. Hal ini terkuak dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR, Kamis (10/06/2021).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto itu memutuskan, ICP sebesar US\$55–70 per barel dan lifting migas 1,736–1,950 juta barel setara minyak per hari yang terdiri dari lifting minyak 705.000–750.000 ribu barel per hari

serta lifting gas 1,031–1,200 juta barel setara minyak per hari.

Disepakati pula volume BBM bersubsidi sebesar 14,80–15,58 juta KL, terdiri dari minyak tanah 0,46–0,48 juta KL dan minyak solar 14,34–15,10 juta KL. Lalu, volume LPG 3 kg disepakati 7,50–8,00 juta metrik ton; subsidi tetap minyak solar Rp500 per liter; dan subsidi listrik Rp39,50 triliun–Rp 61,83 triliun.

Sementara terkait pagu indikatif Kementerian ESDM RAPBN tahun 2022,

Komisi VII DPR menyetujui peningkatan pagu menjadi Rp6,89 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif Kementerian ESDM ditetapkan Rp5,45 triliun.

Dari pagu indikatif sebesar Rp6,89 triliun tersebut, Rp2,76 triliun di antaranya merupakan anggaran Ditjen Migas yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur migas, seperti jaringan gas untuk rumah tangga hingga pembangunan transmisi pipa ruas Cisem.

Arifin Tasrif menegaskan, akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan melaksanakan apa yang kita sepakati dengan best effort kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dan keberhasilan,” katanya.

Kementerian ESDM juga mengharapkan dukungan Komisi VII DPR untuk bersama-sama mencermati program-program yang akan dilaksanakan tersebut. ●

“Penyebab kecelakaan meledaknya tangki ini masih dalam proses investigasi yang dilakukan oleh internal Pertamina dan pihak-pihak eksternal. Termasuk juga kita ingin mendapatkan kajian dari instansi internasional yang menangani bidang kecelakaan kerja seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkap Arifin Tasrif dalam konferensi pers usai meninjau Kilang Pertamina Balongan, Indramayu.

Investigasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran di empat tangki BBM di Kilang Balongan tersebut, menurut Menteri ESDM, masih memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Meski data awal telah diperoleh, namun belum dapat

menjadi dasar untuk memutuskan penyebab terjadinya kebakaran.

“Memang ada data awal. Tapi, kita tidak bisa menjustifikasi langsung. Itu butuh proses karena ada (penyebab) yang terlihat langsung, ada yang tidak terlihat langsung,” ujar Menteri Arifin.

Menteri Arifin juga menegaskan kembali komitmen Pertamina terhadap masyarakat yang terdampak dari kejadian ini, baik kompensasi fisik seperti perbaikan rumah, perawatan diri, dan juga usaha yang terdampak kebakaran ini.

Untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari, Pertamina diminta mengevaluasi sistem keamanan

kilang-kilangnya. Perusahaan pelat merah itu juga diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitarnya sehingga apabila terdapat indikasi peristiwa yang bisa membahayakan, dapat langsung diinformasikan kepada masyarakat setempat untuk dilakukan persiapan lebih dini demi menjaga keselamatan masing-masing.

Kebakaran yang terjadi di tangki BBM Kilang Balongan memang terbilang besar. Namun, insiden tersebut tidak lantas menghentikan proyek petrochemical yang sedang berlangsung di kilang tersebut. Pembangunan infrastruktur tetap berjalan karena merupakan program strategis nasional. ●

Tingkatkan Kompetensi Pegawai, Ditjen Migas Adakan Workshop Perbandingan Regulasi Pengusahaan Gas Bumi Melalui Pipa di Dunia Internasional



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menyelenggarakan Workshop Perbandingan Regulasi Pengusahaan Gas Bumi Melalui Pipa di Dunia Internasional di Hotel Aston Sentul, Bogor, Jumat (11/06/2021). Workshop ini digelar untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, khususnya dan pegawai Ditjen Migas pada umumnya.

“Workshop ini penting mengingat penguatan kompetensi ASN menjadi salah satu dari empat indikator yang menjadi acuan dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih ketika membuka acara ini.

Tema workshop ini, lanjut dia, sejalan dengan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki pegawai Ditjen Migas dalam merumuskan kebijakan hilir migas, di mana diharapkan pegawai dapat mengetahui regulasi atau kebijakan apa saja yang terkait dengan pengusahaan gas bumi melalui pipa di negara lain sehingga diharapkan dapat membuka wawasan serta gambaran yang lebih

jasel terhadap regulasi atau kebijakan di negara lain tersebut.

“Ke depannya, diharapkan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan Pemerintah dapat mendorong iklim investasi di tanah air sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat memperluas infrastruktur, ramah kepada investor, dan bermanfaat bagi bangsa serta negara,” kata Soerja.

Acara ini menampilkan narasumber dari PT Perusahaan Gas Negara, yaitu Jauhar Gama Kurniawan selaku Advisor Regional Sales & Customer Management SOR I, Suryadi Wijaya selaku Advisor Legal Contract, serta Mochamad Haryo Pramantyo selaku Analyst Corporate Planning.

Jauhar Gama Kurniawan menyampaikan, secara umum kompetisi merupakan fondasi terbaik agar suatu bisnis dapat berjalan baik dan efisien.

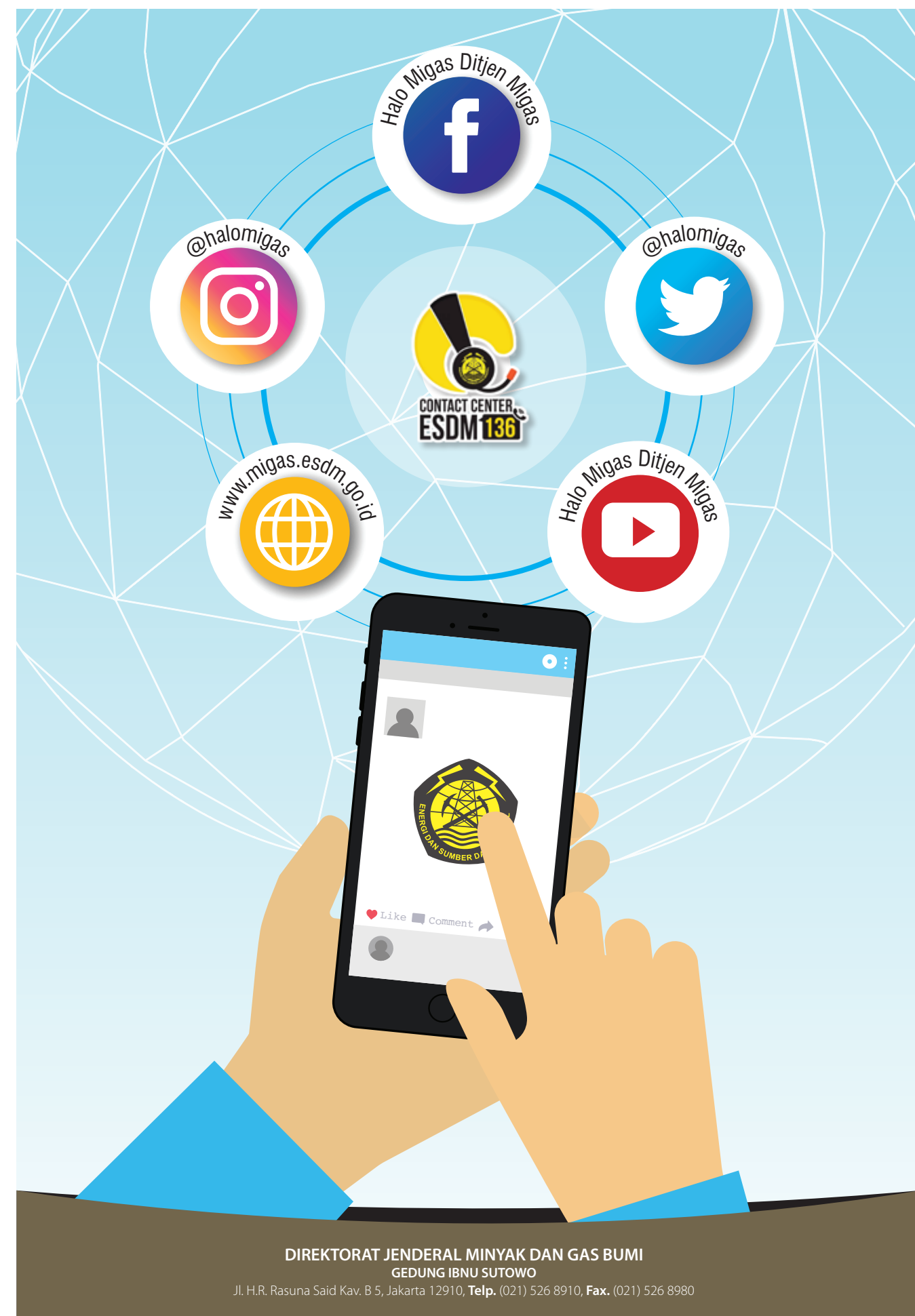
“Kalau ada penyedia barang dan jasa dikompetisikan, biasanya akan memberikan sisi terbaik dari harga, kuantitas, kualitas dan sebagainya. Kalau kalah bersaing, pasti badan usaha akan lebih efisien

untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya,” tuturnya.

Namun demikian, tidak semua bisnis bagus untuk dikompetisikan. Ada karakteristik bisnis tertentu yang jika dikompetisikan justru akan menciptakan market failure, di antaranya bisnis yang bersifat monopoli alamiah. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan gas dengan skala tertentu di suatu daerah, akan lebih murah jika dialirkan melalui satu pipa yang besar, dibandingkan dialirkan melalui beberapa pipa yang kecil. Namun, lebih lanjut Jauhar menegaskan, dalam pelaksanaan monopoli dibutuhkan regulasi agar tidak terjadi abuse of power.

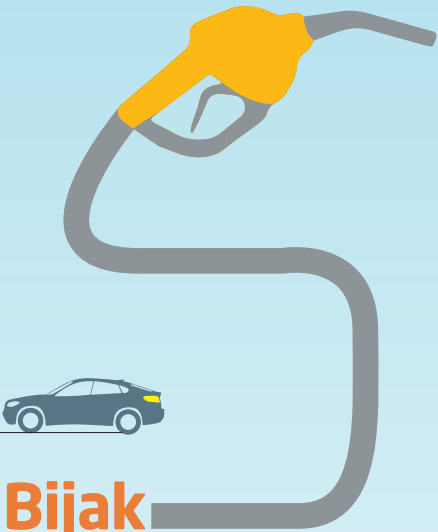
Sementara itu, Mochamad Haryo Pramantyo menyampaikan, terdapat dua konsep besar dalam pengaturan infrastruktur pipa transmisi gas. Pertama adalah konsep sentralisasi di mana pihak yang berperan dalam pengaturan infrastruktur gas bumi adalah badan usaha dan regulator. Kebijakan ini terutama dilakukan di Eropa.

Kedua, konsep desentralisasi di mana pihak yang berperan adalah badan usaha dan customer. Pemerintah tidak terlalu terlibat, namun tetap hadir dengan melakukan pengawasan. Kompetisi yang terjadi tidak murni kompetisi karena ada regulator yang mengatur standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dikompetisikan tersebut. Konsep ini antara lain dianut oleh Amerika Serikat, di mana regulator menerbitkan sertifikat “Public Convenience and Necessity”. ●



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910

Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980

www.migas.esdm.go.id



www.migas.esdm.go.id



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



Halo Migas Ditjen Migas

